

VOLUME 3 NO 3 JUNI-JULI 2018  
LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID  
MAJALAH DWI BULANAN  
P-ISSN 2503 3352  
E-ISSN 2528 4181

RAKORNAS KELITBANGAN 2018  
MENYOKONG PONDASI MENDORONG INOVASI

HASRAT LAMA  
ANGGARAN BARU

# MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

## RUU SISNAS IPTEK

DARI PENGGABUNGAN LEMBAGA  
LITBANG HINGGA MENYOAL  
ATURAN PENELITIAN



9 772528 418001



# CALL FOR PAPERS

WWW.JURNAL.KEMENDAGRI.GO.ID

MP memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.

## KETENTUAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

### KETENTUAN

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.

Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespon isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Sumber referensi minimal 10 buah dan 50% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

### SISTEMATIKA

Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (American Psychological Association) style.

Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri  
Jl. Kramat Raya, No 132,  
Senen, Jakarta Pusat



Submit artikel Anda ke  
[jurnal.kemendagri.go.id](http://jurnal.kemendagri.go.id)



Informasi lebih lanjut di  
[redaksi@matrapembaruan.com](mailto:redaksi@matrapembaruan.com)



Moh. Ilham A Hamudy  
0821 1139 3927

**P**ENGGABUNGAN Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terpusat dalam satu induk mengemuka, setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan evaluasi terhadap BPP di K/L yang tidak produktif. Lembaga-lembaga kelitbangan tersebut selama ini dianggap lebih banyak menghabiskan APBN, sementara produktivitasnya sangat minim.

Dukungan peninjauan kembali lembaga riset yang tidak produktif juga datang dari mantan Presiden Indonesia ke 5 Megawati Soekarno Putri. Ia menyarankan ada aturan baru terkait lembaga riset di Indonesia, agar lembaga riset benar-benar menjadi *leading sector* pembangunan Indonesia.

Revisi UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian kemudian dilakukan yang selanjutnya akan menjadi RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Dalam RUU tersebut, lembaga-lembaga kelitbangan digabung dalam satu wadah yang dinamakan Badan Riset Nasional (BRN). Namun, beberapa pihak menganggap RUU tersebut terlalu mengatur semua persoalan penelitian mulai dari SDM (Sumber

Daya Manusia), anggaran, tuntutan inovasi dan kemajuan riset, hingga peneliti asing.

Isu tersebut menjadi fokus *Media BPP* dalam penerbitan kali ini. Hal itu sangat tepat di tengah banyaknya pertanyaan maksud dari wacana pemerintah tersebut, serta ke mana selanjutnya lembaga kelitbangan akan berlabuh.

Selain isu utama tentang RUU Sisnas Iptek, *Media BPP* juga membahas poin penting Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan 2018 pada Mei lalu di Jakarta. Rakornas tersebut difokuskan pada sokongan pondasi bagi eksistensi BPP Daerah, serta mendorong agar BPP Daerah aktif mewujudkan inovasi di daerah.

Tidak kalah menarik, pada rubrik lainnya *Media BPP* kali ini juga memuat potensi alam daerah yang tersembunyi di Sumatera Barat, Profil BPP Sumatera Barat, lebih dekat dengan Direktur Polcomm Institute, serta beberapa rubrik lainnya yang kami sajikan untuk mencerahkan pembaca.



Selamat membaca..

Redaksi...

## MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHO KUMOLO  
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	SRINANI KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA ALEXANDER YANUARD DALLA
PELIPUTAN	INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI  
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT  
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM



**S**ETELAH satu bulan penuh menjalani ibadah puasa, saatnya umat muslim di seluruh dunia untuk menyambut Idul Fitri. Momen Idul Fitri merupakan hari yang memiliki nilai *ukhuwah* di antara sesama. Tidak hanya umat muslim tetapi juga sesama masyarakat sebangsa dan setanah air turut merasakan khasanah dan keberkahannya.

Idul Fitri juga merupakan penutup Ramadan sekaligus penanda dari terbukanya lembaran baru yang dipenuhi dengan kesucian karena seluruh dosa telah dilebur selama Ramadan. Ibadah puasa menitipkan pesan yang luas, menyentuh seluruh elemen dan dimensi kehidupan manusia.

Puasa mendidik para hambanya menajamkan nilai-nilai keseimbangan antara kesenangan dan kepedulian, antara kerja dan ibadah, antara kesenangan lahir dan kesenangan batin, serta antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Puasa juga mendorong umat Islam untuk melakukan keseimbangan antara ilmu dan amal, antara rasa takut dan harapan, serta keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama. Ini sejalan dengan tujuan akhir dari ibadah puasa,

yakni membentuk manusia yang bertaqwa. Ketaqwaan merupakan wujud dari nilai-nilai keseimbangan antara kualitas hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada manusia dan alam semesta.

Dengan berbekal spiritualitas Ramadhan, mari kita jadikan Idul Fitri ini untuk menguatkan tekad saling melebur dosa di antara kita dengan saling memaafkan, menguatkan niat untuk menebar kasih sayang dengan saling mengunjungi dan silaturahmi. Dengan demikian, menjadi sempurnalah kesucian diri kita, bersih dari dosa kepada Allah dan bersih pula dari dosa kepada sesama kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berbesar hati memberikan maaf yang tulus kepada sesamanya. Ulurkan tangan dengan ikhlas memohon maaf. lapangkan hati untuk memberikan maaf. Mulai langkah baru dengan jiwa yang baru dan hati yang bersih.

Akhir kata, mewakili Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1439 H, *Minal Aidin wal Faidzin*, mohon maaf lahir batin.

**Dodi Riyadmadji,**  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri

## MEDIA BPP

VOLUME 3 NO 3 | JUNI-JULI 2018

BPP DAERAH 34  
**BPP SUMATERA BARAT**  
TARGETKAN 1 OPD 10 INOVASI

**TOKOH 44**  
Heri Budianto, Direktur Polcomm Institute

**AKTIVITAS 6**  
JENDELA BPP **18-32**

**KOMIK 33**

**KILAS BERITA 42-43**

**SAINS DAN  
TEKNOLOGI 46**

**GAYA HIDUP 47**

**RESENSI BUKU 48**

**RESENSI FILM 50**

**SASTRA 52**

**OPINI**

**ORIENTASI KONTESTASI  
POLITIK LOKAL 54**

**GREEN SUKUK DAN ERA BARU  
PENDANAAN LINGKUNGAN 56**

**CATATAN  
BATAM 58**



**RAKORNAS KELITBANGAN 10  
MENYOKONG PONDASI MENDORONG INOVASI**

SETAHUN SEKALI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENDAGRI DAN DAERAH BERKUMPUL MEMBAHAS ISU PENTING PERMASALAHAN LEMBAGA KELITBANGAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. PERTEMUAN TAHUN INI DIFOKUSKAN PADA SOKONGAN PONDASI UNTUK MEMPERKUAT LEMBAGA KELITBANGAN PUSAT DAN DAERAH, SERTA MENDORONG INOVASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA.

**DAERAH 34  
MENJELAJAH NEGERI MINANGKABAU**

### LAPORAN UTAMA 22-32 RUU SINAS IPTEK

RENCANA LAHIRNYA REVISI UU 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SUDAH MEMASUKI BABAK PENGODOKAN DI RANAH DPR (DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT) RI. RUU ITU DIRASA MENGATUR SEMUA PERSOALAN PENELITIAN DI INDONESIA. MULAI DARI SDM (SUMBER DAYA MANUSIA), ANGGARAN, TUNTUTAN INOVASI DAN KEMAJUAN RISET, SERTA PENELITI ASING.



## Pj Gubernur Kalbar Resmikan Kapal Kemanusiaan 03 Kalbar

**K**ESEJAHTERAAN masyarakat menjadi masalah utama pembangunan di Kalimantan Barat yang memiliki luas 146.807 kilometer persegi, setara 1,5 kali pulau Jawa. Luasnya wilayah tersebut membuat rentang kendali pemerintahan kian sulit, ditambah lagi anggaran yang tidak memadai membuat konektivitas antarwilayah terkendala.

Selain itu, geografis wilayah Kalimantan Barat yang sebagian besar memanfaatkan transportasi sungai menyebabkan pemerintah susah membuka keterisolasian. Masalah infrastruktur tersebut saat ini menjadi salah satu faktor penyebab 8 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar ditetapkan sebagai wilayah tertinggal.

Untuk meminimalisasi hal itu, April lalu Pj Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji meresmikan kapal kemanusiaan 03 Kalimantan Barat di Grand Kartika Hotel, Pontianak. Menurutnya, kapal tersebut untuk menjembatani aktivitas sosial atau pekerja sosial yang selama ini kesulitan mengakses daerah terpencil yang ada di Kalimantan Barat.

Dodi juga turut mengapresiasi Yayasan Muslim Asia (AMCF) yang telah banyak memberikan bantuan kemanusiaan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil selama ini. Terlebih kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan di Kalimantan Barat, namun juga di beberapa daerah dengan kondisi geografis perairan lainnya.

“Kehadiran kapal kemanusiaan 03 AMCF ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bisa membantu program pemerintah dari sisi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kalimantan



Barat. Karena banyak masyarakat yang tinggal di desa terpencil termasuk yang ada di pulau-pulau Kalimantan Barat ini,” kata Dodi.

Kapal kemanusiaan tersebut dihadirkan oleh Donatur Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) atau Yayasan Muslim Asia dari Uni Emirat Arab, Mohammad Thoyyib Khoory. Tujuannya tidak lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tujuan pemberian kapal guna memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada pembatas perbedaan, seperti suku, agama ataupun perbedaan lainnya,” tuturnya.

Kapal Kemanusiaan tersebut merupakan kapal keempat yang didistribusikan AMCF di Indonesia. Sebelumnya, AMCF telah meluncurkan program kapal kemanusiaan di tiga lokasi yakni Sorong Papua Barat, Ternate Maluku Utara dan Makassar Sulawesi Selatan. Setidaknya, AMFC menargetkan delapan kapal kemanusiaan di seluruh Indonesia.

Melalui kapal tersebut, pelayanan akan difokuskan di daerah bantaran sungai dan pedalaman. Untuk itu Khoory mengatakan perlu kolaborasi bersama seluruh *stakeholders* dalam mensukseskan program pelayanan kemanusiaan yang dibutuhkan masyarakat.

“Program ini tidak bisa sukses sendiri, namun perlu kerja sama dengan berbagai pihak khususnya pemerintah daerah dan lembaga sosial lainnya. Kami berharap semua pemangku kepentingan bisa bekerja sama dengan kapal kemanusiaan yang sudah beroperasi di sini,” pintanya.

Kehadiran kapal tersebut bisa menjadi salah satu bentuk inovasi pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang tersebar di beberapa wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Selain itu, program tersebut diharapkan bisa membangun kesejahteraan Kalimantan Barat yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. (MSR)

## Kewenangan Urusan Penerbangan Masih Ambigu

**JAKARTA** - Ambiguitas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata tidak hanya terkait masalah pengalihan kewenangan urusan pendidikan, tetapi juga dalam pengelolaan urusan perhubungan penerbangan yang tertera dalam lampiran lembar ke 70 UU No 23 Tahun 2014. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam seminar terkait Pengembalian Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. Seminar tersebut dilaksanakan oleh Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri, pada 23-24 Mei 2018 di Hotel Mercure, Jakarta.

Provinsi Jawa Barat dengan Bandara Kertajati, Provinsi Kepulauan Riau dengan Bandara Hang Nadim, dan Provinsi Banten dengan Bandara Soekarno Hatta merupakan contoh provinsi yang telah berinvestasi besar merasa, mereka bingung terhadap kewenangan tersebut. Fredrick Simatupang Kepala Bidang Urusan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah BPP Kemendagri mengatakan, dalam lampiran itu, pemerintah Kabupaten/Kota hanya diberikan kewenangan tunggal berupa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, sementara pengelolaan diberikan kepada pusat.

Pernyataan tersebut juga diamini oleh peserta seminar yang berasal dari Dishub Provinsi Papua Barat. Ia menginginkan lampiran tersebut kembali diisi sebagaimana kewenangan daerah pada regulasi sebelumnya. “Kami butuh payung hukum yang melindungi. Bagaimana bisa kita membuat sesuatu, kemudian dibatasi. Padahal pembangunannya juga menggunakan dana Otsus, kami juga aktif membantu jika ada kejadian, seperti tergelincirnya Batik Air, kami turun membantu. Kami minta bantuan tolong dikembalikan,” keluhnya.

Wahyu Suharto Kasubdit Urusan



Perhubungan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II juga mengakui, terjadi paradoks antara praktik kelembagaan di Daerah dengan amanat peraturan. Lampiran tersebut telah menghilangkan kewenangan daerah dalam mengelola penerbangan.

“Kewenangan Provinsi praktis hilang dan kewenangan Kabupaten/Kota tereduksi hanya pada wilayah pemberian izin Helipad,” ucap Wahyu.

Seminar juga menyimpulkan beberapa solusi seperti perlunya turunan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatur berbagai masalah penerbangan. Horas Mauritz Panjaitan Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP mengatakan, kegiatan riset yang akan dilakukan Pusatnya hanya bertujuan untuk menemukan posisi ideal kewenangan urusan penerbangan supaya menjadi *multiplier effect* bagi pembangunan daerah.

“Jadi penelitian yang akan dilakukan oleh pusat kita tidak menitikberatkan pada konteks kepemilikan sarana dan prasarana, namun untuk menemukan bagaimana posisi ideal dari kewenangan urusan penerbangan agar menjadi *multiplier effect* bagi pembangunan daerah,” tuturnya.

Selain Mauritz, Herie Saksone peneliti BPP mengatakan pentingnya membahas persoalan kewenangan, khususnya kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, ia mengapresiasi beberapa masukan dan pendapat dari peserta dan narasumber.

“Ini akan menjadi masukan berharga, ke depannya akan bagaimana, apakah nanti akan dibuat regulasi turunan untuk mengatur masalah ini, atau bagaimana,” ucapnya. (RF/MSR)



## Tata Kelola Jurnal yang Benar Mendesak Dilakukan

**P**UBLIKASI karya ilmiah menjadi agenda penting bagi para peneliti dan unit kerja yang memiliki tupoksi kelitbang di Indonesia. Keberadaan jurnal ilmiah sebagai wadah publikasi juga tidak hanya untuk meningkatkan prestise publikasi ilmiah Indonesia, tetapi juga menjadi indikator kinerja pemerintah yang memiliki fungsi kelitbang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP). Untuk itu tata kelola jurnal ilmiah yang baik dan benar mendesak dilakukan

oleh para pengelola jurnal yang ada di BPP Daerah.

Permendagri No 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan, semua hasil kelitbang harus bermuara dalam Jurnal Ilmiah, menjadi motivasi bagi BPP daerah mulai serius mengembangkan jurnal ilmiah.

Di sisi lain, tidak sedikit pula BPP Daerah yang tidak menganggap penting keberadaan jurnal. Adapun

beberapa BPP yang tengah berfokus mengembangkan, masih kebingungan untuk memulainya, apalagi ketika memasuki proses bisnis jurnal ilmiah tersebut. Terlebih saat ini pengelolaan jurnal wajib beralih ke dalam sistem elektronik.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ilmiah di beberapa daerah, BPP Kemendagri gencar melakukan super visi pengelolaan jurnal ilmiah khususnya yang berada di bawah naungan lembaga kelitbang daerah. Supervisi yang dilakukan

“SUPERVISI YANG DILAKUKAN BPP KEMENDAGRI BUKAN TANPA ALASAN. PASALNYA, BPP KEMENDAGRI SAAT INI DIANGGAP SUKSES MENGELOLA JURNAL ILMIAH YANG MENJADI ACUAN BAGI BEBERAPA PENGELOLA JURNAL DI BPP DAERAH

BPP Kemendagri bukan tanpa alasan. Pasalnya, BPP Kemendagri saat ini dianggap sukses mengelola jurnal ilmiah yang menjadi acuan bagi beberapa pengelola jurnal di BPP Daerah.

Sebagai contoh, setahun terakhir pengelola Jurnal Bina Praja (JBP) yang dikelola BPP Kemendagri kerap diundang untuk memberikan pengetahuan terkait pengelolaan jurnal ilmiah di daerah. Dari mulai pulau paling barat Sumatera hingga pulau paling timur Papua.

### Workshop pengelolaan Jurnal Inovasi Gorontalo

Beberapa waktu lalu Moh Ilham A Hamudy pengelola JBP mengunjungi Provinsi Gorontalo. Ia diundang oleh BPP Provinsi Gorontalo sebagai narasumber dalam acara workshop peningkatan kualitas jurnal inovasi Gorontalo. Pengelolaan jurnal tersebut saat ini akan bermigrasi dari cetak ke sistem elektronik (*online*).

Jurnal yang terbit setiap April, Agustus, dan November tersebut merasa perlu berbenah. Pasalnya selama ini Jurnal Inovasi Gorontalo masih memiliki banyak kekurangan seperti kualitas naskah yang belum menyesuaikan dengan kaidah dan etika publikasi ilmiah.

Menurut Ilham masalah utama jurnal ilmiah di BPP Daerah adalah pengelola jurnal yang berimbas pada mutu sebuah jurnal. Di sisi lain, minat penulis yang ada di daerah juga menjadi masalah utama pengelolaan jurnal.

“Banyak pengelola jurnal tidak mengerti proses atau alur pengelolaan jurnal dari mulai ketika artikel diterima, tidak diseleksi dengan ketat dan tidak peduli terhadap kualitas naskah, sehingga jurnal yang dikelolanya tidak bermutu

dan akhirnya tidak terakreditasi,” ucapnya.

Masalah lain, Ilham menambahkan, banyak penulis yang tidak memahami maksud dan tujuan penelitiannya sendiri. Mereka tidak paham kenapa penelitian dilakukan. “Pada umumnya banyak penulis hanya membahas hasil dari laporan penelitian di lapangan saja, minim analisis, itu yang kerap saya temukan ketika mendapatkan naskah,” tambahnya.

Jurnal inovasi Gorontalo saat ini memiliki cakupan yang spesifik yakni terkait pendidikan di Gorontalo. Namun menjadi tidak berhubungan ketika judul yang digagas adalah inovasi dengan sasaran penulisnya para peneliti yang ada di BPP Provinsi Gorontalo dan di instansi lainnya dengan berbagai bidang keilmuan, maka jurnal tersebut menjadi tidak relevan. Hal itu juga yang sedikit disinggung oleh Ilham.

Untuk itu ilham menyarankan, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam sisitem *online*, ada baiknya Jurnal Inovasi Gorontalo memikirkan kembali nama dan tema besar yang digagas jurnal tersebut.

Dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Anis Naki turut mengapresiasi acara. Anis berharap peningkatan kualitas jurnal ilmiah bisa menunjang program pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Untuk itu sudah sepatutnya kita mendukung acara ini, karena kualitas jurnal ilmiah juga bisa menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah provinsi Gorontalo,” tuturnya.

### Workshop Jurnal Kota Malang

Selain Grontalo, awal April lalu melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang)

Kota Malang, Pemkot Malang menyelenggarakan seminar pengelolaan jurnal ilmiah. Dalam acara tersebut, Baperlitbang sekaligus meluncurkan jurnal Pangripta yang terbit di edisi perdana, yaitu pada Maret 2018.

Sama halnya dengan jurnal Inovasi Gorontalo, jurnal tersebut akan dikelola dengan sistem elektronik. Pengelolaan jurnal elektronik tidak dapat ditolak, pasalnya Perka LIPI No 1 Tahun 2014 mewajibkan pengelolaan jurnal harus beralih dari cetak menuju *online system*.

Menurut Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso jurnal Pangripta tersebut dibentuk untuk menampung beberapa hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Barenlitbang, serta penelitian-penelitian yang dilakukan terkait perencanaan pembangunan kota Malang. “Jurnal ini akan terbit dua kali dalam setahun yakni Maret dan November,” ucapnya.

Meski terbit perdana. Ilham mengapresiasi pengelolaan Jurnal Pangripta, karena sudah terbit secara *online* serta bisa diakses dengan mudah. Adapun beberapa permasalahan yang terdapat dalam artikel tampaknya masih menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh pengelola Jurnal Pangripta maupun jurnal pada umumnya.

Misalnya dalam sebuah artikel yang dimuat di Jurnal Pangripta, banyak penulis di bagian abstrak tidak secara jelas menyebutkan latar belakang, tujuan, metode, hasil temuan, dan kesimpulan penelitian. Selain itu, tidak sedikit juga artikel yang tidak menyebutkan kebaruan artikel tersebut.

Menurut Ilham hal tersebut sebaiknya harus selesai ketika di redaksi pelaksana, ketika artikel tersebut dikirim oleh penulis. “Substansi artikel juga menjadi penilaian utama ketika akan mengajukan akreditasi,” terang Ilham.

Pada masa mendatang diharapkan keberadaan jurnal di lembaga litbang daerah bisa lebih baik, tidak hanya bertambah secara kuantitas seiring dengan banyanya lembaga litbang yang mulai membangun jurnal, tetapi juga dari sisi kualitas sehingga bermanfaat bagi dunia publikas ilmiah di Indonesia. (MSR)

RAKORNAS KELITBANGAN 2018

# MENYOKONG PONDASI MENDORONG INOVASI

SETAHUN SEKALI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENDAGRI DAN DAERAH BERKUMPUL MEMBAHAS ISU PENTING PERMASALAHAN LEMBAGA KELITBANGAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. PERTEMUAN TAHUN INI DIFOKUSKAN PADA SOKONGAN PONDASI UNTUK MEMPERKUAT LEMBAGA KELITBANGAN PUSAT DAN DAERAH, SERTA MENDORONG INOVASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA.

Program Gerakan Indonesia Mandiri yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, menekankan perilaku inovatif di kalangan birokrasi. Perilaku inovatif menjadi solusi menghadapi persaingan global. Inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing serta menjaga kepercayaan, sekaligus menghilangkan skeptisme birokrasi di masyarakat.

Inovasi menjadi indikator utama reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Di tingkat daerah, BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) dituntut menjadi pemacu pertumbuhan inovasi daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan BPP dianggap berperan dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pembinaan BPP Daerah sangat penting dilakukan oleh BPP Kemendagri sebagai salah satu upaya menumbuhkembangkan inovasi di daerah.

Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dalam bidang kelitbangan, BPP Kemendagri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan sebagai wadah bertemunya seluruh aktor penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan sinergitas visi, misi, program, dan kegiatan, serta menjangkau permasalahan pembangunan kelitbangan di daerah.

Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji mengatakan tujuan diselenggarakannya Rakornas Kelitbangan 2018 tersebut untuk mewujudkan BPP Pusat dan Daerah sebagai lembaga *think tank* dalam perumusan kebijakan dan implementasi inovasi daerah.

Menurut Dodi, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan saat ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam merumuskan regulasi/kebijakan publik (*public policy*), baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, BPP harus menekankan pentingnya perencanaan berbasis penelitian dan inovasi dalam pelaksanaannya. "Artinya, setiap perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi, sehingga pengambilan keputusan strategis oleh para pimpinan daerah dilaku-

kan secara tepat dan bermanfaat serta bermakna bagi kepentingan publik," tuturnya.

Melalui Rakornas Kelitbangan diharapkan tersusun beberapa *output* di antaranya, strategi untuk mencapai standar kompetensi bagi pejabat fungsional peneliti pusat dan daerah, agenda dan komitmen inovasi daerah 2017-2019, integrasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), kesepakatan kerja sama fasilitasi, replikasi, dan penerapan inovasi daerah melalui Puja Indah, serta sinergitas kelembagaan kelitbangan dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Acara tersebut dilaksanakan pada 8-9 Mei 2018 lalu di Jakarta dengan tema "Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendorong Inovasi Daerah". Rakornas dibuka oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri. Dalam kesempatan tersebut juga hadir beberapa narasumber seperti Aryawan Soetiarso Poetro dari Direktorat Otonomi Daerah – Kementerian PPN/Bappenas, Agus Fanar Syukri dari Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

## Puja Indah

Selain menghadirkan para narasumber kompeten, Rakornas juga *me-launching* Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Puja Indah merupakan sistem pendukung inovasi dan pelaksanaan kegiatan kelitbangan. Puja Indah berupa sistem informasi, evaluasi, dan penilaian inovasi daerah berbasis partisipasi masyarakat, serta berbasis *e-survey* dan jejaringan penelitian yang terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Hadi Prabowo yang mewakili Menteri Dalam Negeri sangat mengapresiasi hal itu. Sebab, sejak 2012 Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Riset dan Teknologi telah menginisiasi inovasi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Negara dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja pemerin-

tah daerah melalui inovasi daerah, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan inovasi daerah secara berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.

“Saya mengapresiasi peluncuran Puja Indah pada malam ini, karena merupakan langkah awal percepatan pembaruan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat menuju pemerintahan modern-futuristik. Melalui replikasi inovasi ini, saya menghimbau agar K/L mendorong inovasi bagi percepatan pembangunan daerah. Daerah-daerah inovatif akan menjadi *role model* bagi daerah lainnya. Inovasi terbaik dapat direplikasi secara nasional yang diterapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Hadi.



Hadi juga berharap, replikasi inovasi yang dilaksanakan oleh BPP Kemendagri mampu menjadi penggerak inovasi di seluruh negeri, sehingga terbentuk poros pemerintahan yang inovatif, berbasis kepentingan rakyat sekaligus mendorong peningkatan daya saing Indonesia pada tataran global.

“Harapan saya agar proses uji coba ini dapat dirampungkan secara paripurna dalam waktu tiga bulan, sehingga pada akhir 2018 kita dapat menerapkannya secara nasional. Begitu pula untuk daerah percontohan dapat segera menjadi tempat belajar bagi daerah lainnya dalam penerapan replikasi inovasi,” harapnya.

**Kunci sukses pemda**

Selain Hadi Prabowo, Suhajar mendukung kegiatan kelitbangan yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya BPP di daerah menjadi salah satu kunci sukses pemerintah daerah selain Kepala Daerah dan kontrol masyarakat. “Untuk itu BPP di daerah tidak boleh berkecil hati dan tidak boleh berhenti melakukan inovasi, BPP Daerah merupakan lembaga penting yang bisa membantu pemerintah daerah berinova-

“REPLIKASI INOVASI YANG DILAKSANAKAN BPP KEMENDAGRI DIHARAPKAN MAMPU MENJADI PENGGERAK INOVASI DI SELURUH NEGERI, SEHINGGA TERBENTUK POROS PEMERINTAHAN YANG INOVATIF, BERBASIS KEPENTINGAN RAKYAT SEKALIGUS MENDORONG PENINGKATAN DAYA SAING INDONESIA PADA TATARAN GLOBAL.

si,” tegasnya.

Menurut Suhajar, BPP merupakan contoh lembaga yang mendukung efisiensi pemerintah. Karena dengan kegiatan penelitian yang dilakukan hari ini, pemerintah bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. “Kita bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan yang dilakukan hari ini. Kita sudah membeli masa depan de-

ngan harga hari ini. Banyak kejadian yang dialami hari ini, karena prediksi masa lalu berdasar ilmu pengetahuan. Contohnya revolusi industri 4.0 yang tengah mengguncang dunia saat ini,” ucapnya.

Berbeda dengan Suhajar, Aryawan Soetiarso Poetro dari Direktorat Otonomi Daerah – Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, BPP bisa sukses jika program yang dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang sudah ditetapkan. Menurutnya dari 5 poin RKP 2019, dua di antaranya berkaitan dengan BPP. Aryawan juga mengkritisi selama ini BPP sering kali berjalan sendiri-sendiri minim koordinasi khususnya yang ada di daerah. Akibatnya beberapa BPP hanya sibuk mengurus pekerjaan administratif.

Untuk itu, Aryawan menyarankan enam hal yang bisa dilakukan BPP baik pusat maupun daerah. Pertama, perlunya evaluasi efektivitas replikasi model inovasi perizinan yang sudah dilaksanakan pada Tahun sebelumnya. Selanjutnya agar BPP memiliki *power* maka setiap program harus selalu memerhatikan kebutuhan pembangunan daerah dan karakteristik lokal.

“Ketiga, kerja sama dengan unit kerja lainnya di Kemendagri cukup penting dalam rangka penyempurnaan replikasi model inovasi, serta hal lainnya seperti penyusunan dan pemanfaatan indeks, Kemudian ke-empat, perlu menyiapkan kriteria atau persyaratan minimal, serta pedoman/standar langkah-langkah untuk proses replikasi inovasi ke daerah lainnya,” saran Arwan.

Di sisi lain, Arwan juga menyarankan, setiap fitur aplikasi yang dibangun Puslitbang Inovasi Daerah BPP harus mempertimbangan implementasi regulasi terkait SPM, PTSP, SIPD dan penerapan urusan konkuren lainnya. Terakhir perlu penyeragaman dengan K/L yang memiliki program-program serupa terkait inovasi seperti KemenPAN dan RB serta LAN,” tutupnya. (MSR/IFR)



# TRANSFORMASI SDM KELITBANGAN

Tidak hanya mengoptimalkan peran daerah melalui inovasi litbang dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat, beberapa permasalahan yang kerap menjadi kendala BPP Daerah pun terus didiskusikan, agar tercipta program optimal dalam membangun lembaga *think tank* daerah. Untuk itu, pada acara Rakornas Tahun ini, BPP Kemendagri juga membuat 3 komisi utama yang membahas ragam penguatan lembaga dan SDM daerah agar mampu berdaya saing dan terciptanya masyarakat daerah yang maju

**F**okus pada persoalan Transformasi Kelembagaan Kelitbangan dan sumber daya manusia, Sidang Komisi I Rakornas Kelitbangan ternyata masih banyak hal yang berserakan dari BPP Daerah. Pasca-dikeluarkannya PP No 18 Tahun 2016 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dinamika internal kelembagaan BPP hingga saat ini masih belum seragam bentuk kelembagaannya di tingkat pusat dan daerah.

Untuk itu, beberapa perwakilan BPP

Daerah mencoba mentransformasikan kelembagaan dalam empat pokok bahasan, yakni regulasi, lembaga, SDM kelitbangan, dan Publikasi.

Pokok bahasan *pertama*, terkait regulasi. Beberapa daerah menganggap isu strategis Lembaga Litbang Belum dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. “Kami berharap tentunya, agar setiap proses perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah *based on research* serta menyelaraskan program litbang

dengan program pembangunan nasional dan daerah,” kata Asneli perwakilan dari BPP Provinsi Jambi.

Hal itu ditanggapi oleh forum dengan berbagai masukan dan rekomendasi strategis agar peran BPP selalu dilibatkan dalam proses pembangunan dan perencanaan pembangunan. Seperti Mendorong Kepala Bapenas untuk menerbitkan Keputusan Kepala Bappenas agar Bappeda melibatkan lembaga litbang dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. “Hal itu juga

perlu didorong dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait keterlibatan BPP dalam proses perencanaan untuk diperkuat menjadi Peraturan Mendagri,” tambahnya

Dewi Gartika, dari BPP Provinsi Jawa Barat juga menyarankan, Kemendagri perlu mengharmonisasikan kebijakan, program, dan kegiatan kelitbangannya dengan tiga kementerian terkait. Seperti Kemenristek dan MenPAN-RB. “Untuk di daerah kami lebih sering bersentuhan dengan riset dalam beberapa kajian, sedangkan kebutuhan SDM juga kami terbelur di KemenPAN-RB, makanya kami berharap sekali, kalau BPP Daerah mau maju, dorong juga dengan harmonisasi di dua kementerian ini,” terangnya.

Selain itu, isu strategis yang menjadi bahasan adalah belum terlibatnya lembaga litbang dalam proses penyusunan naskah akademik. Hal ini karena lemahnya peran dan fungsi BPP dalam menghasilkan naskah akademik sebagai dasar pembentukan regulasi kebijakan, serta fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana Pasal 209 dan 219 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Sehingga itu berimplikasi pada revisi dan pembatalan peraturan perundang-undangan dan Perda,” terang Dewi.

Rekomendasi yang ditawarkan Dewi adalah perlunya regulasi yang menegaskan keterlibatan lembaga litbang dalam penyusunan naskah akademik di lingkungan pemerintah daerah sehingga penyusunannya memenuhi kaidah akademik. “Bisa juga dengan menyiapkan pedoman penyusunan naskah akademik oleh BPP yang selaras dengan Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan pengembangan kapasitas SDM Tim Kelitbang penyusunan naskah akademis yang berkualitas dan aplikatif bagi penyusunan regulasi,” tambahnya.

Lalu terkait penguatan fungsi dan peran lembaga litbang yang dinilai masih

lemah dalam pembinaan, kewenangan dan disharmonisasi fungsi dengan perangkat daerah lain. Mereka berharap adanya pembinaan BPP Kemendagri dan Balitbangda Provinsi kepada BPP Kab/Kota. “BPP saya rasa perlu *review* kembali Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan baik yang terkait dengan ruang lingkup kelitbangannya maupun penerbitan rekomendasi izin penelitian. Selain itu perlu juga harmonisasi fungsi kelitbangannya antara BPP dengan perangkat daerah lainnya,” kata Aprianto dari BPP Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Lalu terkait pembahasan *ketiga*, mengenai keterbatasan SDM baik secara kuantitas dan kualitas. Mereka menyepakati perlu adanya kemudahan persyaratan *inpassing* dan memperpanjang waktu *inpassing* sampai dengan 2019. “BPP perlu mengajukan kepada MenPAN RB untuk membuka formasi ASN baru bagi peneliti, perekayasa, analis kebijakan, mengajukan pembiayaan pendidikan calon peneliti dan peningkatan kompetensi SDM Kelitbangannya di mana pembiayaannya difasilitasi oleh BPP Kemendagri atau LIPI (peneliti), LAN (analisis kebijakan) dan BPPT (perekayasa), mengajukan usulan perbaikan evaluasi kelas jabatan peneliti terkait pemberian tunjangan kinerja kepada MenPAN RB sesuai dengan beban kerja dan profesionalisme peneliti, mengajukan revisi kebijakan MenPAN RB terkait penempatan peneliti utama tidak di daerah tetapi harus di pusat, dan Mengajukan revisi kebijakan MenPAN RB terkait Rangkap Jabatan dan lembaga litbang,” jelas Asneli.

Sementara itu, terkait publikasi BPP yang dianggap tidak begitu *urgent* bagi lembaga litbang daerah, BPP Kemendagri telah menawarkan Integrasi *da-*

**“BPP KEMENDAGRI TELAH MENAWARKAN INTEGRASI DATABASE RENCANA KELITBANGAN BERTUJUAN UNTUK PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI REGISTRASI KELITBANGAN SECARA MASIF OLEH BPP DI SELURUH PEMDA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA AGAR TERWUJUD DATABASE HASIL-HASIL KEGIATAN KELITBANGAN DI SELURUH INDONESIA**

*tabase* rencana kelitbangannya bertujuan untuk pemanfaatan sistem informasi registrasi kelitbangannya secara masif oleh BPP di seluruh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terwujud *database* hasil-hasil kegiatan kelitbangannya di seluruh Indonesia.

“Untuk membangun kapasitas publikasi, diseminasi dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangannya sebenarnya telah tertuang dalam Surat Kepala BPP Kemendagri Nomor 481.2/2466/LITBANG per 8 September 2017 yaitu: Penguatan fungsi jurnal ilmiah pada setiap BPP Daerah sebagai media publikasi karya tulis ilmiah, melalui komitmen pimpinan, dukungan anggaran dan sumber daya lainnya; BPP Provinsi agar mengoordinasikan pengelolaan jurnal ilmiah yang ada di masing-masing.

BPP Kemendagri berupaya memfasilitasi dan mensupervisi secara konseptual baik peralihan jurnal cetak menjadi elektronik maupun pengelolaan jurnal ilmiah secara elektronik. “Kami juga mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Registrasi Kelitbangannya (SIMRK) pada aplikasi *E-Research* yang memudahkan BPP Daerah melakukan diseminasi hasil-hasil kelitbangannya,” kata Syabnikmat, Kepala Puslitbang BPP yang memimpin sidang. (AYD/IFR)



## MENANTI KOLABORASI TANPA BASA-BASI

Kolaborasi diharapkan tidak hanya sekadar basa basi yang setiap Tahun mengemuka. Langkah konkret dari BPP Kemendagri bisa menjadi modal untuk menghilangkan skeptisme BPP Daerah. Keyakinan tersebut tentu saja ditujukan kepada BPP Kemendagri yang selama ini dianggap sebagai garda utama kelitbangannya pemerintahan dalam negeri.

**S**TRATEGI kolaborasi kelitbangannya nasional, penajaman program dan kegiatan kelitbangannya, serta prospek pendanaan menjadi salah satu topik utama Rakornas Kelitbangannya pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan pada Mei 2018 lalu. Beberapa persoalan mengemuka, seperti belum adanya integrasi riset di lingkup pemerintahan dalam negeri antara Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dan BPP Daerah, rendahnya kemampuan menghasilkan produk kelitbangannya, serta minimnya anggaran yang selama ini menyertai keberlangsungan BPP.

Dalam hal kolaborasi, pangkal permasalahan terletak pada belum adanya sinkronisasi antara rencana program kelitbangannya yang dilakukan Kemendagri dengan K/L dan daerah. Sehingga integrasi riset di lingkup pemerintahan dalam negeri cukup terkendala. Sebagai contoh BPP Kemendagri dan BPP Daerah belum memunyai *grand design* sebagai acuan pelaksanaan otonomi daerah. Riset disusun berdasarkan ide sesaat atas

dasar keinginan. Akibatnya banyak hasil riset tidak terpakai. Untuk itu, penyusunan program kebijakan skala nasional antara BPP Kemendagri dan BPP Daerah harus segera dibangun agar arah program menemukan jalan yang tepat.

Di sisi lain, mengenai wacana kolaborasi kelitbangannya nasional, beberapa peserta dari BPP Daerah memiliki pandangan berbeda. Jalaludin Sambesi dari Bappeda Provinsi Maluku, misalnya, mengatakan tidak perlu lagi dibangun kolaborasi. Selama ini menurut Jalaludin kolaborasi sudah terbentuk. “Yang diperlukan BPP Daerah saat ini adalah bagaimana agar program yang digagas itu semakin tajam. Sebenarnya itu masalah utama kita. Program apa yang mau dipertajam,” tuturnya.

Apa yang dikatakan Jalaludin ada benarnya, pasalnya kemampuan BPP menghasilkan produk kelitbangannya yang berkualitas selama ini tidak bisa dikatakan tinggi, bahkan masih terbelakang rendah. Padahal, produk kelitbangannya berkualitas menurut Mauritz Panjaitan Kapuslitbang Pembangunan dan Keuda se-

cara nyata bisa menjadi dasar untuk menentukan perencanaan (*planning by research*), memformulasi kebijakan (*formulating policy*), serta untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan (*controlling*).

“Urgensi penajaman program semakin kentara ketika tingkat relevansi riset yang dihasilkan BPP dengan masalah dan kebutuhan pemangku kepentingan sangat kurang. Contohnya masih banyak hasil riset BPP lebih sering menghiasi lemari ketimbang dimanfaatkan oleh *stakeholder*,” ujar Mauritz, saat memimpin diskusi terkait penajaman program dalam Rakornas tersebut.

Selain Jalaludin, I Gusti Nyoman Surayana dari BPP Lampung Tengah, menyoroti masalah pendanaan. Menurut Nyoman, BPP masih dipandang sebelah mata dikarenakan alokasi anggaran tidak pernah mampu menjangkau keberadaannya sebagai lembaga yang penting dan strategis. Anggaran kecil tersebut selama ini belum berfokus pada pemanfaatan hasil riset secara fenomenal di tingkat nasional. “Kami (BPP Daerah) perlu regulasi yang lebih tegas terkait anggaran kelitbangan,” kata Nyoman.

Diskusi kemudian menghasilkan solusi, kesimpulan menyatakan rendahnya anggaran BPP saat ini, disinyalasi karena BPP lemah dalam membangun *partnership*, dengan unsur lembaga riset akademisi maupun swasta, di level nasional dan internasional. Untuk itu, BPP Kemendagri mewacanakan beberapa solusi, di antaranya pada tahun ini akan memfasilitasi *partnership research* dengan lembaga penelitian swasta/pemerintah dan perguruan tinggi bergengsi dalam dan luar negeri.

BPP Kemendagri juga akan memfasilitasi kerja sama *training*

luar negeri dan seminar/konferensi internasional, serta memfasilitasi forum meeting kelitbangan dan inovasi daerah yang melibatkan multi *stakeholder* seperti K/L terkait, unsur Pemerintahan Daerah, NGO, dan organisasi internasional (Kompak, UNDP, OECD dll). Di sisi lain, BPP Kemendagri telah menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) yang akan digunakan untuk pembinaan BPP di daerah seperti kegiatan *e-research*, kegiatan inovasi daerah, program pembangunan daerah (*e-planning*), program keuangan daerah (*e-budgeting*), pengelolaan asset (*e-reporting*), serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal kolaborasi, BPP Kemendagri juga akan memfasilitasi *grand design* dan *road map* riset skala nasional dan daerah serta tahapannya, untuk menjawab penyusunan riset lingkup pemerintahan dalam negeri yang terintegrasi. Agar terjalin kerja sama riset, nantinya juga akan diwajibkan kepada provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan beberapa kajian di antaranya kajian kapasitas Pemda dalam penyediaan layanan berdasarkan beban dari setiap urusan pemerintahan; Kesiapan daerah dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilleg 2019; Potret desa masing-masing daerah di era digitalisasi, serta; Evaluasi kemanfaatan Dana Desa.

Beberapa agenda dan wacana BPP Kemendagri tersebut tengah dinanti. Komitmen yang ditandatangani di atas kertas itu diharapkan bisa diwujudkan pada tahun ini. BPP Daerah berharap besar, agar janji-janji tersebut tidak hanya tersimpan di dalam map besar. Kesepakatan yang dibangun harus diwujudkan agar tidak hanya menjadi pemanis seremoni yang dibahas berulang kali. Ada adagium, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. (MSR)

## MEMPERKUAT INOVASI DAN JARINGAN

Lahirnya PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menuntut beberapa daerah memunyai peran dalam hal inovasi, terutama inovasi pelayanan publik. Namun sayangnya, tidak sedikit daerah yang belum paham bagaimana menjalankan fungsi dan amanah PP terusan dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu. Tak sedikit yang mempertanyakan peran SIDA, masalah anggaran, SDM (Sumber Daya Manusia), dan juga dukungan tiap pemerintah daerah

**D**ALAM rapat Komisi III, yakni membahas mengenai Penguatan Tatakelola Pemerintahan Melalui Inovasi Daerah dan Kolaborasi Lintas *Stakeholder* yang dipimpin oleh Syafrizal, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, banyak perwakilan BPP Provinsi/Kabupaten yang mempertanyakan peran Sistem Inovasi Daerah dalam penerapan PP tentang Inovasi Daerah.

Seperti yang ditanyakan oleh Miftahul Rahman dari BPP Mataram, terkait kurangnya koordinasi antara Kemenpan dan Kemendagri dalam persamaan

persepsi dan parameter yang mesti menjadi acuan daerah dalam tata kelola pemerintahan. “MenPAN punya aturan sendiri, Kemendagri juga punya aturan sendiri terkait Inovasi Daerah, apalagi dengan adanya PP tentang Organisasi Perangkat Daerah, banyak juga daerah yang justru malah hilang BPP, bagaimana kami mau membangun inovasi?” tanyanya.

Miftahul berharap BPP Kemendagri serius dalam hal membangun koordinasi antar K/L dan membuat peta terkait pembagian inovasi baik dalam inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintah, dsb. “Sebab tiap daerah punya kapasitas masing-masing,” tandasnya.

Tidak hanya soal koordinasi, permasalahan di daerah terkait kewajiban inovasi ini memang beragam, misalnya di beberapa daerah tertinggal seperti di Maluku, mereka menjadi satu dari 174 kabupaten tertinggal. Senda Aditama perwakilan dari Kabupaten Serang Bagian Timur menyatakan, peran BPP di daerah tertinggal hanya titipan organisasi belaka, hampir tidak punya peran sama sekali. “Karena memang tidak ada aturan yang mengikat perencanaan pembangunan *by riset*,” terangnya.

Kalau dipaksakan *by riset*, butuh anggaran yang lebih. “Misalnya untuk sebuah *project* penelitian butuh 500 juta, dengan uang segitu bisa buat bangun jalan sekian meter, lagi pula, masih ada di sekitar kami jalanan rusak, sekolah rusak, daripada sifatnya buat dokumen berbasis riset yang dilombakan dalam ajang IGA (*Innovative Government Award*),” curhatnya.

Menanggapi beberapa pertanyaan dan cerita dari berbagai daerah itu, Syafrizal mengatakan bahwa sebenarnya kesempatan BPP itu besar. BPP Daerah bukan satu-satunya aktor yang bekerja. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Analoginya seperti Kota Bandung: Bandung pakai *tagline*: integrasi, desentralisasi, dan kolaborasi sudah cukup itu saja. Integrasi artinya semua disederhanakan, lalu desentralisasi sebanyak mungkin didesentralisasikan ke bawah, ke kelurahan, kecamatan, bukan terbalik. Setelah

itu baru dikolaborasi. Kita akan menuju dunia prospektif, terbiasa menguji dan mengapresiasi perubahan sekecil apapun. Memang beban kerja BPP cukup signifikan, tentu dari 570 BPP Kabupaten/Kota butuh proses dan energi yang lebih. Seberapa besar kami bergerak, punya strategi dan ide. Semua akan kita rangkul, baik daerah yang sudah maju atau terdalam. Nanti saat IGA (*Innovative Government Award*) juga akan kita libatkan mereka,” paparnya.

Untuk itu, dalam pembahasan rapat Komisi III, Syafrizal mengajak semua peserta dalam merumuskan arah kebijakan inovasi daerah ke depan. Beberapa pendapat, usul dan masukan semua ditampung dalam rapat jajak pendapat Komisi III.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan Komisi III, yakni Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah, mereka merekomendasikan adanya pembangunan harmonisasi, sinergitas, dan kolaborasi melalui penyusunan rencana aksi daerah terkait inovasi, lengkap dengan tata cara replikasi dan diseminasi inovasi daerah. “Yang pengujian inovasinya melibatkan Balitbang atau lembaga yang memiliki tugas fungsi kelitbangan,” kata Syafrizal.

Pengembangan replikasi dan disemina-

si inovasi daerah yang sudah berkembang ke daerah tertinggal juga diharapkan oleh BPP Daerah bahkan hingga tahap digitalisasi layanan pemerintahan (komitmen kepala daerah), pembentukan wadah inovasi dalam rangka pengembangan inovasi.

Lalu terkait regulasi teknis penerapan inovasi daerah, BPP Daerah berharap terbentuknya Permendagri atau Perda Inovasi Daerah yang isinya tentu menjadi dasar hukum inovasi di daerah, perencanaan, tahapan, pengukuran, tata cara pendaftaran, pelaksanaan inovasi daerah, evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan. “Penerapan inovasi daerah juga perlu terintegrasi dengan Puja Indah, masing-masing satu kabupaten/kota memahaminya. Dengan begitu, meningkatnya dukungan jaringan, kebutuhan, komitmen, dan ketersediaan SDM yang dibutuhkan,” tambahnya.

Komisi III juga sepakat untuk membuat slogan 1 OPD 1 Inovasi, dan membuat standar kompetensi pamong inovasi sebagai agen penerapan dan pemanfaatan inovasi pada daerah *pilot project*. “Perlu adanya rencana konkret semacam itu, kalau perlu ada bimtek nasional bagi setiap pamong inovasi yang dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), harapan kami demikian,” selorohnya mengakhiri diskusi. (IFR)



## Ciptakan Kajian Serba Replikasi

**P**USLITBANG Inovasi Daerah pada tahun ini banyak menciptakan kajian aktual terkait replikasi inovasi. Hal itu diucapkan langsung oleh Safrizal, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah saat ditemui *Tim Media BPP* di ruangnya beberapa waktu lalu.

Kajian aktual itu di antaranya meliputi tiga hal. Pertama, kesiapan daerah inovatif dan strategi yang harus dilakukan. Seperti mengkaji potensi dan hambatan inovasi di beberapa Daerah. “Kami mencoba memetakan daerah-daerah mana saja yang sudah maju inovasinya, terutama inovasi dalam hal pelayanan publik,” paparnya.

Daerah itu, seperti Pati, Sumatera Barat dan beberapa daerah yang sudah maju lainnya. Pada kesempatan yang sama, Safrizal bersama tim juga sedang membedah bagaimana kondisi inovasi di Pati, Jawa Tengah meliputi potensi dan tantangannya. Cara itu dianggap efektif untuk terjun lapangan, mengetahui secara langsung apa-apa yang menjadi masalah inovasi di daerah. “Tentu untuk lokus kajiannya nanti kita random ya, daerah yang kita anggap sudah maju, daerah yang sedang berproses menuju inovasi, dan daerah yang tertinggal. Dari situ masing-masing akan kita bedah potensi, hambatan, dan tantangannya,” paparnya.

Selain kajian inovasi dan strategi daerah, Puslitbang Inovda juga mengkaji inovasi pelayanan apa yang paling sering digunakan oleh



daerah. “Jadi ada banyak sekali inovasi yang daerah lakukan, yakni inovasi dalam pelayanan administrasi catatan sipil, perizinan, pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Itu lah yang ingin

kita ranking dan klasifikasikan, sehingga dari situ kita tahu mana yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam inovasi pelayanan. Sehingga program replikasi yang dibuat daerah-daerah memiliki ekspektasi,” jelasnya.

Hal itulah yang melatarbelakangi inovasi tepat guna bagi masyarakat, sehingga inovasi bukan hanya kewajiban semata pemenuhan amanat PP Inovasi Daerah tapi menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.

Terakhir, Puslitbang Inovda akan melakukan kajian inovasi di komponen-komponen Kemendagri terutama terkait pelayanan. “Kalau perlu itu terintegrasi dengan daerah. Seperti SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) *online*, jadi *paper less* begitu misalnya,” imbuhnya.

Dari ketiganya itu, Safrizal berharap dapat memfasilitasi daerah dan komponen membuat sistem yang bisa berbagi pakai, seperti aplikasi yang *download* di android misalnya, terkait tujuh pelayanan utama yang sudah menjadi fokus kajiannya. Seperti Pelayanan Perizinan, Pelayanan Tenaga Kerja, Pelayanan Komiditi, Pendidikan, Kesehatan, Halo DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan Administrasi Kependudukan.

Mengingat begitu banyaknya program kajian aktual inovasi yang nantinya akan direplikasikan ke seluruh daerah dan komponen itu, Safrizal mengaku akan menyusun langkah strategis agar programnya itu tidak hanya menjadi wacana belaka. Langkah awal yang harus dia bangun adalah menyiapkan sistem yang bisa terjangkau di beberapa daerah dengan kapasitas yang mampun menampung data sesuai dengan kapasitas tiap pelayanan daerah. “Lalu kita juga akan menyusun rencana aksi dengan Kementerian dan Lembaga sesuai dengan target daerah mereka masing-masing atau lebih tepatnya pembagian peran,” katanya.

Pembagian peran itu misalnya, Kementerian Ristek dan Dikti fokus pada pengembangan Iptek di lokus daerah tertentu. “Kami berharap tiap Kementerian dan Lembaga itu punya lokus daerah yang berbeda, sehingga tercakup lah semua daerah yang ada,” imbuhnya.

Secara optimis, sekali lagi Safrizal ingin meyakinkan, bahwa BPP Kemendagri sebenarnya mampu mengerjakan itu semua secara paralel. “Jangan jadi Badan Penelitian yang Jarkoni (*Iso ngajar ora iso ngelakoni*) (Bisa ngajar, tidak bisa melaksanakan-*red*). Kita ingin membuktikan bahwa Badan Litbang itu bukan Badan yang sulit berkembang, tapi Elit dan Memanggakan,” tutupnya dengan optimis. (IFR)

## Kaji Dampak Kebijakan Ekraf

**P**USLITBANG Pembangunan dan Keuangan Daerah melaporkan hasil kajiannya mengenai Dampak Kebijakan Ekonomi Kreatif terhadap Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan sumber daya dan potensi di daerah yang kurang mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Untuk itu, Puslitbang Keuda melakukan kajian di tiga Kabupaten/Kota untuk mengetahui seberapa besar potensi dan juga kendala yang dialami di daerah. Lokus kajian mereka berfokus pada Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kota Bandung, Jawa Barat, dan Kabupaten Badung, Bali.

Dalam rangka mendukung potensi tersebut, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan payung hukum Inpres No 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif, Perpres No 72 Tahun 2014 tentang Badan Ekonomi Kreatif serta Permendagri No 9 Tahun 2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD). Namun ketiga daerah lokus kajian Puslitbang Keuda itu setelah dilakukan wawancara dan observasi lapangan belum mengaplikasikan regulasi tersebut.

“Di Tapanuli Utara misalnya, pelaku usaha maupun pegawai Pemda masih banyak yang belum mengetahui terbitnya regulasi tersebut. Pengembangan produk unggulan masih secara konvensional dan belum maksimal. Produk yang ada dan dianggap komoditas unggulan seperti kopi, kacang tanah sihobuk, kain ulos, dan gitar sipoholon belum didukung dengan adanya regulasi dari Pemda sebagai tindak lanjut dari kebijakan Ekraf dan PUD (Produk Unggulan Daerah),” terang Rosmawati Sidauruk, Ketua Tim Peneliti pada kajian tersebut

Berbeda dari Tapanuli Utara, Kota Bandung dan Kabupaten Badung, Bali sudah mengembangkan Inpress dan PUD dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) mereka, terutama Kota Bandung. “Di Bandung dampak pengembangan Ekraf: saat ini sudah ada 400 **outlet** industri kreatif dan dapat menyerap kurang lebih 334 ribu tenaga kerja dan memberikan kontribusi 11 persen untuk pertumbuhan ekonomi kota, artinya adanya pertumbuhan ekonomi secara positif dengan rata-rata pertumbuhan 5-7 persen per tahunnya,” kata Rosmawati

Namun sayangnya kebanyakan pelaku industri kreatif banyak yang mengeluh minimnya fasilitas yang didapatkan untuk mengembangkan usaha, sulit mengakses bantuan

modal kepada perbankan. “Belum ada insentif berupa kemudahan perizinan dan keringanan pajak yang dapat mendorong industri kreatif untuk tampil menjadi pengusaha handal,” terangnya.

Untuk itu, Rosmawati menyarankan pemerintah perlu membawa kolaborasi antara pengembangan ekraf dengan pengembangan PUD dalam bentuk Perpres, mengevaluasi peraturan pusat tentang persyaratan dalam perolehan hak paten yang berpihak kepada pelaku usaha. “Optimalisasi pemberdayaan bagi pelaku usaha UMKM dan Koperasi terkait pengembangan Ekraf berbasis PUD dan kemudahan aksesibilitas terhadap perbankan yang difasilitasi oleh Pemda,” sarannya.

Selain itu, menurut Mauritz Panjaitan, Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah menyarankan, Pemerintah Pusat perlu mengembangkan kebijakan untuk produk unggulan daerah berinovasi ekraf untuk penguatan landasan pemerintah daerah yang lebih mendukung ekonomi kreatif tiap daerah,” terangnya.

Regulasi itu tentu sangat penting dalam mengatur lebih lanjut terkait pengembangan daerah ekraf sesuai dengan kluster-kluster potensi tiap daerah, sehingga sesuai dengan tata kelola pemerintah. “Dari regulasi itu pemerintah juga perlu mendukung kapasitas SDM, kelembagaan, dan pemasaran dalam rangka mendorong PUD berbasis Ekraf. Selain itu di setiap daerah didorong sehingga ditetapkan prinsip *One Village, One Product*,” paparnya. (IFR)



# Pentingnya Mengurus Akta Kematian

**P**USLITBANG Administrasi Kewilayahan, Pemerintah Desa, dan Kependudukan, akan melakukan kajian strategis mengenai pentingnya mengurus akta kematian di tengah masyarakat. Hal itu diungkapkan langsung oleh Gatot Tri Laksono, Kepala Bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil, menurutnya selama ini warga kurang memahami manfaat dari mengurus akta kematian.

“Akta kematian itu banyak manfaatnya baik oleh anggota keluarga maupun untuk pemerintah daerah. Jadi kalau ada anggota keluarga yang meninggal segera lapor ke Disdukcapil,” kata Gatot.

Sebab, menurutnya akta kematian ini juga menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris. Selain untuk kepengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. “Akta kematian ini juga berguna bagi janda atau duda, khususnya yang berstatus PNS, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya,” ungkapnya

Sedangkan bagi pemerintah, akta kematian itu penting sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya. “Pemerintah juga penting sekali untuk pendataan Pilkada dan Pilpes, ada banyak sekali contoh kasusnya, misalnya orangnya sudah lama meninggal namun dikatakan masih hidup, jadi bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik,” terangnya.



Penting diingat juga, surat kematian dan akta kematian adalah dua hal yang berbeda. Begitu pula dengan prosedurnya, sangat berbeda. “Akta kematian jauh lebih rumit, tapi *legal standing*-nya lebih kuat akta kematian. Kalau mau mengurus ahli waris yang diterima adalah akta kematian,” paparnya.

Dengan masih minimnya pemahaman warga tentang pentingnya akta kematian bagi setiap keluarga, Gatot pun mengharapkan agar pemerintah daerah dan masyarakat bersikap lebih pro aktif dalam melaporkan kematian warganya kepada Disdukcapil, agar data dapat terus *up to date*. “Jadi jajaran perangkat desa/kelurahan sampai ke RT harus pro aktif.

Karena tidak mungkin mereka tidak tahu apabila ada warganya meninggal dunia. Setelah dilaporkan, Disdukcapil akan menerbitkan akta kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ujarnya.

Gatot berharap, melalui kajian strategisnya itu didapat salah satu contoh penyelenggaraan inovatif di daerah seperti di Jakarta, lalu bisa direplikasikan ke daerah yang belum maju. (IFR)

# Pilkada Papua Berdemokrasi melalui Tingkat Partisipasi

**P**emilihan Kepala Daerah langsung menjadi cara membangun demokrasi-politik di tingkat lokal. Hal tersebut menjadi tuntutan guna memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah dimulai, termasuk pula partisipasi politik masyarakat di daerah. Mereka merupakan instrumen pendukung pemerintah daerah yang patut diperhitungkan dalam mendukung kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Namun sayangnya di beberapa daerah, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada memilih pemimpin lokal dalam memperkuat otonomi khusus masih sangat rendah, di Papua salah satunya.

Keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut masih jauh dari harapan. Seperti kasus Pilkada Jayapura yang hanya diikuti oleh calon tunggal. Dari total jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) misalnya, tidak sampai 60 persen yang menggunakan hak suaranya.

“Rendahnya partisipasi politik masyarakat terjadi dalam penyelenggaraan pilkada di salah satu daerah yang menggelar kontestasi pesta demokrasi lokal memang banyak faktor yang diperhitungkan dan hal tersebut merupakan hal yang nyata,” kata Syabnikmat, Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan PUM yang memaparkan rencana kajian strategi kebijakan pilkada di provinsi papua dan papua barat dalam memperkuat otonomi khusus di program kerja 2018 ini.

Papua menjadi daerah yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi untuk penyelenggaraan pilkada, sehingga kemungkinan besar konflik harus diminimalisasi dengan strategi kebijakan pilkada yang tepat. Selan politik uang, sistem noken juga disinyalasi menjadi pemicu konflik.

Syabnikmat yang juga mantan anggota DPR RI mengatakan, Kepala Suku memiliki hak penuh untuk menyalurkan suara warganya. Hal ini merupakan konsekuensi sang kepala suku sebagai pemimpin politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketidakpatuhan pada keputusan kepala suku, kata



Foto: Tempo.co

dia, menjadi pemicu konflik.

“Oleh karena itu, kami merasa penting memerhatikan dan menganalisis dengan cermat, melihat potensi konflik Papua yang besar, sistem demokrasi lokal yang terbangun, sehingga tidak ada lagi perilaku mal-demokrasi tersebut sebagai bentuk politik transaksional. Dengan cara mengupayakan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam penciptaan demokrasi guna mendukung penguatan otonomi khususnya,” terangnya.

Dari hasil kajian strategis ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi ilmiah sebagai landasan kebijakan ilmiah dalam merumuskan regulasi dan arah strategi penciptaan demokrasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. (IFR)





# RUU SISNAS IPTEK, MESIN LAMA DESAIN BARU

RENCANA lahirnya revisi UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah memasuki babak penggodokan di ranah DPR (Dewan Permusyawaratan Rakyat) RI. RUU itu dirasa mengatur semua persoalan penelitian di Indonesia. Mulai dari SDM (Sumber Daya Manusia), anggaran, tuntutan inovasi dan kemajuan riset, serta peneliti asing. Sebagai lembaga kelitbangan dan hidup dalam lingkungan riset, BPP Kemendagri perlu tahu apa dan bagaimana isi dari RUU itu disusun, karena Kemendagri menjadi 1 dari 3 Kementerian yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam hal pengaturan RUU yang dikenal dengan RUU Sisnas Iptek tersebut, lantas seperti apa perjalanan RUU tersebut, isi dan perdebatan perancangannya hingga sekarang? Simak Laporan Utama BPP berikut ini



**P**ENGUJUNG April 2017 lalu, **Tim Media BPP** mengunjungi kantor **Prakoso, Sekretaris Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek dan Dikti** untuk mendalami bagaimana RUU Sisnas Iptek tersebut terbentuk, ada beberapa Pasal yang baru ditambahkan dan direvisi yang menjadi urgensi mengapa UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu direvisi.

#### Kronologi

Menurut **Prakoso**, perkembangan zaman menuntut UU tersebut direvisi karena dianggap tidak relevan lagi dengan masa pada saat itu. Pada 2011 **Kemenristek Dikti** menyusun naskah akademik RUU tentang SINas (Sistem Inovasi Nasional), dalam hasil uji publik naskah akademik RUU SINas tersebut dihasilkan bahwa UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu diubah.

“Karena UU itu terbentuk pada 2002, setelah 9 tahun kemudian yakni pada 2011, kami merasa ini perlu diubah karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan zaman. Misalnya pada UU yang lama, revolusi digital belum masuk dalam pembahasan, jadi UU ini seyogyanya sudah harus memegang amanah itu. Kami lantas mulai membedah lagi apa-apa saja yang perlu ditambah dan dikurangi,” jelasnya.

Lalu pada 2012 **Kemenristek** melakukan uji publik naskah akademik, betul tidak *sih* UU itu perlu diubah, ternyata menurut hasil uji publik dengan beberapa pakar dan tim kelitbang K/L (Kementerian/Lembaga) perlu diubah. Setelah disepakati perlunya ada revisi UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi barulah pada 2013 dimulailah penyusunan naskah akademik perubahan UU tersebut.

Baru pada 2014 naskah akademik RUU

Perubahan ini perlahan disempurnakan. Mulai dari penyusunan draft perubahan, pengusulan RUU perubahan, pengusulan RUU dalam *long list* Prolegnas RUU 2015-2019 (nomor 92). “Pada 2014 ini juga kami mulai menyusun PAK (Panitia Antar Kementerian) dan bersurat lah kami ke seluruh K/L untuk Anggota Tim Panitinya,” kata **Prakoso**.

Pada saat itu, menurut **Prakoso** **Kemendagri** menjadi salah satu Kementerian dari 3 Kementerian yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Yakni **Kemenristek**, **Kemenkum HAM** dan **Kemendagri**. Diakui **Prakoso**, dari pihak **Kemendagri** sendiri banyak berganti-ganti orang dalam mengawal perancangan draft RUU tersebut, terutama di komponen Litbangnya. Mulai dari **Marwan** (Mantan Kepala Badan BPP), **Teguh Narutomo** (Kabid di salah satu Puslitbang BPP), **Herie Saksono** (Peneliti BPP), hingga terakhir **Dodi Riyadmadji** (Kepala BPP) yang kini menjabat sebagai Pj. Kalimantan Barat yang sempat mengikuti hingga di ranah DPR.

**Tim Media BPP** lantas menemui salah satu perwakilan dari BPP **Kemendagri** yang mengawal RUU Sisnas Iptek, **Herie Saksono**. Menurutnya sejak 2013 yang menjadi fokus antara **Kemendagri** dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi (nama sebelum **Kemenristek dan Dikti**) adalah **SIDa** (Sistem Inovasi Daerah) sebelum terbentuknya revisi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP turunannya tentang inovasi, yakni PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

“Karena selama ini kami (**Kemendagri**) menganggap tidak cukup kuat kalau **SIDa** hanya diatur dalam peraturan bersama antar Kementerian, tetapi perlu dimasukkan dalam RUU Sisnas Iptek. Waktu itu memang belum ada UU Pemerintahan Daerah dan PP Inovasi Daerah,” terang **Herie**.

Lalu pada 2014 menurut **Herie**, pemerintah saat itu tidak terlalu masif mengenai rancangan perubahan UU Sisnas Iptek, sebab pada saat itu seluruh komponen sibuk dalam pesta demokrasi Pilpres dan Pileg. “Bahkan sejak 2013-2014 mereka sudah fokus ke pesta demokrasi, jadi ada fase yang tertunda, dari dukungan pemerintah pada saat itu,” terangnya.

Usai pesta demokrasi berlangsung, dengan Presiden yang baru, **PAK** tetap menyepakati beberapa poin yang mesti direvisi. Beruntungnya pada 2015 RUU itu ditetapkan sebagai pengusulan RUU dalam *long list* Prolegnas RUU 2015-2019 dan penyalarsan naskah akademik dengan seluruh K/L di **BPHN** (Badan Pembina Hukum Nasional).

Selanjutnya pada 2016 draft RUU ditetapkan menjadi RUU Perubahan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi penggantian RUU baru. “Hasil rapat **PAK** 3 Februari 2016 disepakati RUU Perubahan UU No 18 Tahun 2002 menjadi penggantian RUU baru, jadi bukan lagi draft. Artinya, di ranah pemerintah RUU tersebut sudah selesai dan sedang menjadi pembahasan

DPR dalam Prolegnas RUU Prioritas 2017 (luncuran 2016),” terangnya.

Pada Mei 2017, DPR membentuk panitia khusus (Pansus) dalam penyusunan RUU Sisnas Iptek tersebut. Dari berbagai sumber berita dan informasi **Prakoso** menyebutkan, nama-nama **Tim Pansus DPR** terkait RUU Sisnas Iptek yakni, **Daryatmo** (F-PDI Perjuangan) sebagai ketua dan didampingi tiga wakil ketua, **Linda Purnomo** (F-PG), **Anita Jacoba** (F-PD), dan **Yuliani Paris** (F-PAN). Sedangkan anggotanya ada **Rieke Dyah Pitaloka** (F-PDIP) dan **Arzetty Bilbina** menurut **Prakoso** (F-PKB).

**Daryatmo** dalam wawancara bersama **gesuri.id** mengatakan, RUU Sisnas Iptek diharapkan bisa menjadikan riset sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan dan pembangunan nasional. “Semangat RUU ini demi mengkonsolidasikan program riset nasional & diharapkan bisa berkontribusi lebih bagi pembangunan dan kebijakan negara,” kata wakil dari **Dapil Jateng II** itu.

Menurutnya demi mengkonsolidasikan program riset nasional tersebut diharapkan Lembaga Litbang bisa berkontribusi lebih bagi pembangunan dan kebijakan negara. Ia menyatakan kenaikan anggaran memang merupakan isu penting yang menjadi perhatian pansus saat ini. “Kita punya acuan UNESCO. Semangatnya anggaran riset penting untuk dinaikkan. Acuan 2 persen itu menjadi pemikiran. Semangat menuju ke sana ada,” kata anggota Komisi VII DPR dari **Fraksi PDI Perjuangan** itu.

Ia juga mengatakan, saat ini Pansus sedang menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan dan asosiasi peneliti. Nantinya, RUU tersebut bakal meng-

gantikan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. “Kami baru sampai penyusunan daftar inventarisasi masalah,” imbuhnya.

Penyusunan daftar inventarisasi masalah itu menurut beberapa sumber yang dihimpun **Tim Media BPP**, melibatkan beberapa anggota, seperti **FPRN** (Forum Profesor Riset Nasional), **Himpinindo** (Himpunan Peneliti Indonesia), **AIPI** (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan **Habibie Center** di DPR sekira pada Februari 2018 lalu.

Hal itu dibenarkan oleh **Syamsuddin Haris**, Ketua **FPRN**. Menurutnya dia banyak diminta masukan terkait RUU dari Pemerintah (**Kemenristek dan PAK**), beberapa masukannya juga sudah diunggah dalam portal **himpinindo.org** yang menyangkut banyak hal terkait RUU yang sudah selesai di tangan Pemerintah tersebut. “Ya ada beberapa hal yang kami rasa belum *tercover* dalam RUU Sisnas Iptek yang dibuat **Kemenristek**, makanya kami kemarin sekira 2 bulan yang lalu kami diundang oleh DPR untuk uji dengar pendapat untuk mengkritisi pasal-pasal yang sudah mereka rancang,” kata **Syamsuddin Haris** saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (16/05).

Tidak hanya **FPRN**, **AIPI** pun juga turut memberikan masukan dalam RUU Sisnas Iptek menurut **Satryo Soemantri Brodjonegoro**, Wakil Ketua **AIPI** berharap RUU tersebut mampu mengakomodasi kegiatan pengembangan iptek dengan mekanisme penganggaran yang sesuai dengan sifat kegiatan pengembangan Iptek. “Kami juga tentu berharap RUU tersebut dapat memberikan insentif dan perlindungan bagi kegiatan pengembangan iptek beserta peneliti dan pengembangnya,” terang professor yang juga kakak dari Menteri **Bappenas Bambang Brodjonegoro** itu, kepada **Tim Media BPP**. (IFR)

# USULAN LEMBAGA BARU BERNAMA BRN

Tim Media BPP telah menghimpun data dari berbagai narasumber. Setidaknya, ada sekira 81 pasal yang disuguhkan dari pihak Kemenristek Dikti, tapi ada beberapa pasal yang menjadi sorotan Anggota Dewan dan Lembaga Riset lainnya dalam uji dengar pendapat di DPR pada beberapa bulan lalu, termasuk wacana pembentukan lembaga baru, SDM (Sumber Daya Manusia), dan anggaran penelitian. Lantas bagaimana wacana ini berkembang?

**B**EBERAPA muatan RUU Sisnas Iptek memuat pengaturan banyak hal di dalamnya, termasuk rencana induk, kelembagaan, SDM, anggaran, dan masalah peneliti asing. Tapi hanya beberapa hal yang menjadi sorotan bagi pelaku peneliti Indonesia selama ini. Seperti masalah kelembagaan, SDM, dan anggaran. Ketiga masalah ini merupakan masalah klasik yang dinilai menjadi pemicu riset Indonesia selama ini belum berkembang.

Sekadar informasi, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI-P Perjuangan sebelumnya pernah mengundang FPRN (Forum Profesor Riset Nasional) terkait wacana pembentukan BRN (Badan Riset Nasional) dalam menyongsong Indonesia Emas berbasis riset pada 2045 (memperingati 1 abad kemerdekaan RI) yang juga pernah didengungkan oleh Presiden Joko Widodo di berbagai media.

Dikutip dari *okezone.com* pada 15 Maret 2018, pernyataan ini disampaikan

Megawati Soekarno Putri di hadapan 11 profesor riset. FNPR yang dipimpin Syamsuddin Haris juga disambut kedatangannya oleh sejumlah politisi PDI-P perjuangan

Syamsuddin Haris dalam pertemuan tersebut menekankan, agar otoritas riset dan teknologi negara dipimpin langsung oleh Presiden. “Kami menganggap dari dulu UU No 18 Tahun 2002 hingga saat ini (RUU Sisnas Iptek) tidak ada percepatan pembangunan riset. Semua indikatornya stagnan,” kata Syamsudin saat *Tim Media BPP* temui di ruang kerjanya

Menurutnya, perlu ada lembaga yang harus menjadi *holding* BPP yang bersekerakan di berbagai Kementerian dan Badan. Rencana lahirnya lembaga baru ini memberikan sinyal adanya upaya penyatuan seluruh BPP yang ada di Kementerian dan Badan. “Memang perlu ada yang menyatukan kami, dan itu di bawah Presiden langsung seharusnya. Seperti yang dilakukan oleh berbagai negara maju. Misalnya Korea



Selatan dan Amerika Serikat yang dipimpin langsung oleh Presiden, begitu pula dengan Jepang juga yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, di depan para profesor, Megawati memerintahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto untuk memperjuangkan buah pemikiran para profesor yang memang

sudah menjadi agenda politik partai dalam pembahasan RUU Sisnas-Iptek di DPR. Namun Megawati juga meminta agar para profesor untuk ikut menyuarakan pendapat mereka di ruang publik tentang perlunya Badan Riset Nasional agar tersosialisasi dengan baik. Selain itu, FPRN juga diminta untuk berkomunikasi dengan Presiden dan Fraksi-Fraksi dari Partai lain.

**Agus Fanar Syukri**, salah satu anggota **Himpenindo (Himpunan Peneliti Indonesia)** juga membenarkan wacana tersebut. Menurutnya konsep BRN ini menggabungkan antara peran LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) milik Kemenristek Dikti. “Setelah RUU itu selesai di Pemerintah dan masuk ke DPR, DPR

mensosialisasikan kepada organisasi-organisasi peneliti. Oleh DPR isinya akan direvisi lagi bahkan hingga 50 persen lebih. Termasuk terkait masukan dari Megawati terkait pembentukan BRN,” terang Agus saat ditemui *Tim Media BPP* usai menjadi narasumber pada acara Rakornas Kelitbang Kemendagri pada 8 Mei lalu di Hotel Mercure, Ancol.

**KONSEP BRN AKAN MENIRU SEPERTI MODEL YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH BELANDA, YANG BERNAMA NSF (NATIONAL SCIENCE FOUNDATION). JADI YANG BERKAITAN DENGAN PENGANGGARAN DAN TEKNIS BERADA DALAM SATU NAUANGAN YANG DISEBUT BRN. DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI KITA INGIN RISET JUSTRU MEMPERKOKOH NKRI**

Menurutnya, hal itu diusulkan oleh FPRN yang dibawa ke DPR dan Megawati. “Intinya dengan adanya FPRN nanti BPPT dan LIPI tidak seperti sekarang. Menurut saya saat ini jenis kelamin LIPI dan BPPT tidak jelas. Mereka masing-masing mengerjakan semua penelitian dari hulu ke hilir, makanya dengan pembentukan BRN tersebut akan diperkuat lagi lembaga penelitiannya. Harus ada lembaga besar yang memayungi lembaga yang kecil-kecil ini,” terangnya yang juga turut hadir dalam uji dengar pendapat organisasi penelitian dengan DPR.

Agus sendiri secara pribadi menyetujui wacana pembentukan BRN tersebut, menurutnya selama ini banyak lembaga di Indonesia, terutama di bawah naungan Kementerian berserakan. “Sehingga sudah anggarannya kecil, harus dibagi-bagikan lagi ke banyak hal pula,” tandasnya.

Konsep BRN menurut Agus, akan meniru seperti model yang digunakan pemerintah Belanda, yang bernama NSF (National Science Foundation). Jadi yang berkaitan dengan penganggaran dan teknis berada dalam satu naungan yang disebut BRN. “Mereka itu punya anggaran besar, jadi kalau misalnya siapa pun itu entah Litbang Kementerian atau Daerah punya *road map* dan program besar atau Program Prioritas Nasional yang sanggup melaksanakan percepatan Bappenas, maka siapa saja bisa mengerjakan PN tersebut,” tutur Agus.

Namun saat kami memverifikasi ke Syamsuddin Haris terkait bola panas usulan BRN yang dibilang Agus me-

rupakan sumber FRPN itu, Syamsuddin membantahnya. Menurutnya, FPRN sebenarnya menyarankan dengan 2 lembaga. Yakni DKIPTEKIN (Dewan Kebijakan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi). Kelembagaan ini disusun oleh Presiden, yang anggotanya Menteri. DKIPTEKIN ini nantinya menjadi sebuah lembaga pembangunan dan perencanaan inovasi, yang nantinya keputusan perencanaan Iptek dan Inovasi dilaksanakan oleh BRIPN (Badan Riset Ilmu Pengetahuan Nasional).

“Supaya lurus keterangannya, sebenarnya yang diusulkan kami adalah BRIPN, sedangkan yang diusulkan Bu Mega itu namanya BRN. Memang hampir mirip *sih* secara fungsinya, tapi sebenarnya konsep BRN itu dari Bu Mega,” paparnya.

Jadi pelaksana kebijakan yang sudah diputuskan DKIPTEKIN itu nantinya diputuskan BRIPN. BRIPN ini semacam *holding* atau gabungan dari BPP termasuk BPP Kementerian. Di dalamnya BRIPN itu, kami mengusulkan lembaga intinya adalah LIPI.

“Namun kemudian saat sidang uji dengar pendapat bersama Pansus DPR mengusulkan, mengapa hanya LIPI saja? Kenapa tidak sekalian BPPT dimasukkan sebagai lembaga intinya, ya sudah jadilah wacana penggabungan. Jadi sebetulnya saran itu bukan dari kami, tapi atas usul pansus DPR. Kalau secara pribadi, respons kami juga tidak menjadi masalah kalau mau digabungkan. *Toh* selama ini UU 18 Tahun 2002 dan RUU Sisnas Iptek selama ini belum mewadahi perkembangan Indonesia

dalam daya saing berbasis Iptek,” tuntutnya.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek dalam wawancara bersama *gesuri.id* membenarkan hal tersebut. Menurutnya jika dilihat dari sisi historisnya, memang sejak zaman Presiden Soekarno ada semacam Dewan Perancang Nasional (Depernas), sebuah badan level nasional yang bertujuan untuk bahan dasar merumuskan kebijakan nasional.

“Kita ingin riset justru memperkokoh NKRI, dengan kemajuan teknologi. Tapi relasi sosial antara kemajuan riset dan NKRI itu menjadi renggang dan harus diimbangi dengan mengharmonisasikan itu semua. Beberapa kali Ibu Mega, bahkan dalam penerimaan Doktor Honoris Causanya di IPDN mengatakan, riset nasional menjadi tema utama pidato beliau, begitu pula saat Profesor LIPI berkunjung ke Kantor DPP PDI-P juga membahas masalah riset. Sebagai kader dan petugas partai, kami memang mendapat arahan dari DPP PDI Perjuangan, khususnya dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang jika dirunut dari sisi historis pernah ada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), kemudian ada Dewan Perancang Nasional (Depernas) di zaman Bung Karno. Itu lah yang dinamakan riset sebagai penelitian dalam sebuah badan level nasional. Jadi tujuannya untuk bahan dasar merumuskan kebijakan nasional,” bebernya.

Dari usulan pada pertemuan Tim Pansus dan beberapa organisasi penelitian ini, RUU Sisnas Iptek diprediksikan tidak bakal diketok palu menjadi UU pada Tahun ini (2018). “Karena memang DPR menganggap itu masih terlalu mentah,

dan agak-agaknya masih banyak yang direvisi bahkan hingga 50 persen lebih,” imbuh Agus.

Sementara saat ditanya bagaimana respons sang pembuat RUU itu, **Prakoso Sekretaris Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti** dan juga stafnya **Syarip Hidayat, Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan**, mengatakan, pihaknya sama sekali tidak tahu menahu terkait rencana pembentukan lembaga baru itu. “RUU dari kami sudah selesai, dan pokoknya dari kami tidak dibunyikan terkait rencana pembentukan lembaga baru, walaupun ada berarti itu usulan dari non Pemerintah (Kemenristek Dikti),” terang Prakoso.

Kemenristek Dikti memang tidak memasukan rencana tersebut karena dianggap bertentangan dengan MenPAN-RB. “*Nah*, dalam aturan yang dibuat pemerintah (Kemenristek) mengharamkan pembentukan lembaga baru, karena diharamkan melalui KemenPAN-RB sendiri, tidak boleh membentuk lembaga baru. Dalam RUU ini pertimbangan tentang DRN (Dewan Riset Nasional) saja tidak bisa kita masukkan, karena tidak boleh menyebutkan lembaga oleh KemenPAN, jadi soal DRN tidak bisa kita sebut sebagai lembaga yang berdiri sendiri apalagi pembentukan lembaga baru. DRN ada di bawah menteri langsung, bukan sebuah lembaga berdiri sendiri. Kalau ada kalimat ‘mendirikan lembaga’ itu berarti muncul dari DPR, karena dari kita sendiri sudah selesai setelah PAK (Panitia Antar Kementerian) menyepakati, Presiden menandatangani menjadi RUU, bukan lagi draft,” kata Syarip.

Kemenristek sendiri mengkhawatirkan dengan kondisi demikian, pengesahan RUU menjadi UU akan menjadi lama dan melewati batas tenggat Agustus 2018. “Kami harapannya sebelum Agustus 2018 sudah selesai. Karena kalau melewati Agustus 2018, RUU ini akan lama lagi tersusun, karena DPR pasti sudah fokus dengan kampanye Pileg dan Pilpres di 2019, yang lebih dikhawatirkan lagi jika anggota De-



wan-nya baru, kemungkinan Pansus ini juga baru lagi, akhirnya tambah lama lagi UU ini menjadi sorot perhatian pemerintah,” terang Prakoso.

Apalagi menurut **Herie Saksono, peneliti BPP Kemendagri**, yang juga turut mengawal RUU dalam Panitia Antar Kementerian mengatakan, RUU ini sudah melewati fase dua kali Pilpres dan Pileg, yang bahaya justru apabila ganti pemerintahan, apalagi jika Presiden baru ternyata tidak mendukung regulasi mengenai otak masyarakat Indonesia.

“Saya menyebutnya ini sebagai regulasi yang mengatur tentang otak masyarakat Indonesia, karena selama ini kerja kita leher ke bawah alias fisik. RUU ini mengatur mengenai bagaimana penelitian kita maju, jadi kalau tidak serius ditangani, tenggelam begitu saja, maka isu-isu menjadi tidak seksi. Mereka akan fokus pada isu-isu lain yang dianggap mendesak, seperti isu teroris, dan renovasi gedung DPR misalnya. Padahal isu ini tidak kalah penting dengan isu-isu RUU lainnya. Apalagi ini isu sejak 2011, sudah terlalu lama, apa yang bisa kita harapkan kalau terlalu lama,” ungkap Agus.

Usulan terkait penggabungan lembaga baru dinilai Herie sebagai wacana politis dari LIPI, kalau merujuk pada PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, peran kontrol termasuk penelitian dan pengkajian sebetulnya sudah ada di BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan LAN (Lem-

■ Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (tengah) saat konferensi pers peluncuran Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah

baga Administrasi Negara). “Jadi LIPI kemana setelah PP yang baru ini, fungsi LIPI tidak ada, jadi bisa dibilang usulan dan wacana ini sangat politis, menurut saya. Tapi saya memang belum riset mendalam terkait ini,” beber Herie

Namun lagi-lagi Agus mengatakan, ini baru wacana yang dilontarkan oleh berbagai organisasi penelitian, yang keputusannya juga berdasarkan KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan. “Kalau misalnya MenPAN-RB dan Kemenkeu setuju, maka kewenangan dari DPR-lah yang ambil alih itu semua, sepakat atau tidak memasukan pembentukan lembaga baru. Memang saya pribadi menyadari pembuatan RUU makan waktu lama, tapi lebih baik tidak terburu-buru supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal,” tutup Agus. (IFR)

**RUU INI MENGATUR MENGENAI BAGAIMANA PENELITIAN KITA MAJU, JADI KALAU TIDAK SERIUS DITANGANI, TENGGELAM BEGITU SAJA, MAKA ISU-ISU MENJADI TIDAK SEKSI.**



## HASRAT LAMA ANGGARAN BARU

Idealnya, penganggaran dana riset suatu negara itu sesuai dengan standar yang digunakan UNESCO yakni 2 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), namun Indonesia sendiri, masih jauh dari angka tersebut. Akibatnya, banyak akademisi atau orang pintar di Indonesia enggan menjadi peneliti, pekerjaannya berat sementara anggaran penelitiannya rendah.

**S**ALAH satu yang menjadi sorotan beberapa narasumber yang *Tim Media BPP* datangi adalah persoalan anggaran penelitian yang dirasa masih jauh dari kata layak. Syamsuddin Haris, Ketua FPRN (Forum Profesor Riset Nasional) menyebutkan, selama 20 Tahun terakhir anggaran penelitian di Indonesia baru sekira 0,09 persen dari PDB, jauh dari standar yang ditetapkan oleh UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Dunia).

Hal ini yang melatarbelakangi SDM (Sumber Daya Manusia) Peneliti di Indonesia

menurun. Disebutkan oleh Syamsuddin, SDM peneliti zaman Presiden Soeharto sempat menunjukkan angka 120 orang peneliti per 1 juta penduduk. "Sekarang hanya 90 orang peneliti per 1 juta penduduk. Jadi poinnya adalah, selama 20 tahun riset kita ini mengalami kemunduran, makanya penting supaya UU ini sungguh-sungguh bisa mewadahi kebutuhan bangsa Indonesia berbasis Iptek," bebernya.

RUU Sisnas IPTEK yang memang merupakan inisiasi pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap UU No 18 Tahun 2002. Di DPR, Pansus juga sudah beberapa kali berkoordinasi

“**ANGGARAN RISET DI INDONESIA SELAMA INI DIPANDANG SEBAGAI GANJALAN UTAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI TANAH AIR. SEHINGGA RUU SISNAS IPTEK DIHARAPKAN BISA MENGARAH PADA PENAIKAN ANGGARAN PENELITIAN. MINIMAL, MENGACU PADA STANDAR UNESCO, YAKNI 2 PERSEN DARI PDB**

si dengan Kementerian Ristek sebagai mitra kerjanya dengan Komisi VII. Sementara untuk ranah Pendidikan Tinggi Pansus yang konsen adalah di Komisi X dan juga berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti BUMN, Pertanian dan Perdagangan agar seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki lembaga penelitiannya bisa bersinergi dengan RUU Sisnas Iptek nantinya. Di situlah kemudian, DPR merasakan di Komisi VII anggaran Ristek itu berserakan. Setiap Kementerian atau Badan Lembaga Negara yang ada riset. Sudah ada Dewan Riset, tapi anggarannya menjadi kecil karena harus dibagi lagi kelembagaannya,” kata Daryatmo Mardiyanto, Ketua Pansus DPR RUU Sisnas Iptek dalam wawancara bersama *gesuri.id*.

Menurutnya salah satu tujuan dari RUU ini adalah menaikkan bagaimana anggaran riset nasional bisa naik. “Anggaran riset di Indonesia selama ini dipandang sebagai ganjalan utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air. Sehingga RUU Sisnas Iptek diharapkan bisa mengarah pada kenaikan anggaran penelitian. Minimal, mengacu pada standar UNESCO, yakni 2 persen dari PDB. Dan yang utama, semangat RUU itu sejatinya demi mengonsolidasikan program riset nasional dan diharapkan bisa berkontribusi lebih bagi pembangunan dan kebijakan negara,” terangnya.

Harapan itu juga dilontarkan oleh Satryo Soemantri Brojonegoro, AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) mereka berharap anggaran R&D (Research and Development) bisa mendekati 1 persen

dari PDB dan jumlah peneliti 350 orang per satu juta penduduk. “Pembiayaan penelitian dilakukan dengan mekanisme *block grant* (hibah) dan berjangka waktu yang panjang (minimal 3 Tahun) lah,” kata Satryo.

Menurut AIPI, secara umum, pendanaan riset melalui APBN saat ini belum dapat mengakomodasi karakter penelitian yang membutuhkan waktu lama, maupun dalam memacu munculnya inovasi. Regulasi pelaporan dana penelitian yang tidak fleksibel membuat waktu peneliti tersita untuk kerja administrasi dibandingkan untuk substansi penelitian. Kondisi yang tidak mendukung ini di perguruan tinggi misalnya masih ditambah dengan beban mengajar yang tinggi, serta kendala berbagai regulasi yang mengurangi kebebasan akademik. Dukungan pendanaan dari sektor swasta yang diharapkan lebih independen dan dapat mendukung lahirnya inovasi, juga masih sangat rendah.

Rendahnya investasi Indonesia di bidang riset dan pengembangan tercermin dari juga memengaruhi rendahnya *gross expenditure on research and development* (GERD) terhadap PDB. Fakta AIPI bahkan menunjukkan pengeluaran Indonesia untuk kegiatan riset dan pengembangan hanya sebesar 0,08 persen dari PDB, terendah di lingkungan ASEAN 5 (Singapura 2,18 persen, Malaysia 1,26 persen, Thailand 0,48 persen dan Filipina 0,14 persen). “Hingga saat ini belum terlihat adanya perubahan dalam sistem pendanaan riset nasional. Dana riset tersebar di berbagai kementerian/lembaga dengan metode pengelolaan yang

berbeda-beda. Namun hanya beberapa kementerian/lembaga yang mengelola dana riset berbasis keunggulan, meskipun proses yang dilakukan masih bersifat lokal, birokratis dan tidak fleksibel. Akibatnya, keluaran seperti *academic excellence*, *economic value* dan *social impact* yang diharapkan dari kegiatan dan program riset tidak optimal dan tidak memuaskan,” imbuh Satryo.

Agar sumber dana riset yang terbatas dapat menghasilkan riset yang efektif, Satryo mengatakan pendanaan harus mengikuti skala prioritas agar berdampak tinggi terhadap produktivitas nasional. “Dalam konteks ini hasil riset harus mampu memupuk modal politik, sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya yang akan menjadi modal nasional untuk meningkatkan kekayaan dan kemakmuran bangsa. Pendanaan riset perlu ditingkatkan secara bertahap ke tingkat sekitar 2 persen sampai 3 persen dari PDB. Mengingat sangat terbatasnya ruang fiskal, maka sumber pendanaan riset dari industri/bisnis swasta perlu ditingkatkan. Untuk itu diperlukan dukungan kebijakan fiskal sebagai insentif bagi industri/bisnis agar kegiatan riset sampai menghasilkan teknologi dan inovasi baru dapat berlangsung secara tuntas,” tuturnya.

Mendengar hal tersebut, **Prakoso Sekretaris Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti** mengatakan, sumber daya dalam Pasal 44 -52 RUU Sisnas Iptek tersebut memang menyebutkan persentasenya. “Jadi kita tidak menyebutkan tidak menyebutkan persentasi APBN, dan APBD untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernah memang disebutkan angka, tapi oleh Kemenkeu tidak perlu disebutkan, itu masukan dari Kemenkeu. Jadi ya kami terpaksa tidak menyebutkannya,” imbuh Prakoso.

Hal itu juga ditambahkan oleh **Syarip Hidayat, Bagian Hukum, Kerjasa-**

**ma, dan Layanan Informasi, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan,** terkait hibah atau sumber lainnya juga diatur dalam Bab Sumber Daya Iptek dalam RUU tersebut. “Ada sumber lain yang sah, diatur oleh PP. Saya kira kita punya aturan lain terkait perencanaan sumber lain itu, seperti hibah, pinjaman, bisa juga berasal dari kontribusi *charity*, atau filantropi. Semua boleh asal tidak bertentangan dengan UU, misalnya UU *Money Laundry*. Misalnya ada perusahaan punya cabang di mana-di mana, ketika dia meminta bantuan penelitian, kita lihat dulu jangan sampai ini menjadi indikasi *money laundry*, monopoli.

Kita kan ada UU yang terkait, hal-hal semacam itu yang kita coba lindungi dari kegiatan kita,” jelasnya.

Apakah nantinya akan dibuat PP? Menurut Syarip, sebenarnya aturan-aturan pemerintah itu cenderung dianggap fiksi dalam hukum, artinya masyarakat dianggap tahu jadi tidak perlu dibuat PP. “Misalnya ada hibah atau bantuan dari asing, kita harus bisa melihat secara selektif, tidak meruntuhkan kewibawaan RI, memecah belah, mengganggu stabilitas politik dalam negeri, dan sifat kehati-hatian kita, nasionalisme agar asing tidak serta merta ikut campur dalam negara kita. Saya kira ada banyak sekali hibah-hibah yang banyak bantu dari asing dan sudah diatur dalam Bab Penelitian Asing dalam RUU ini,” bebernya.

Sebenarnya, setelah beberapa penyisiran *Tim Media BPP* terkait RUU Sisnas Iptek tersebut, ada banyak regulasi yang ditambahkan dan direvisi lebih detail mengenai pengkajian dan penerapan untuk mengakomodasi adanya BPP Teknologi, serta Sumber Daya Iptek dan tambahan pengaturan mengenai Standar Biaya Khusus untuk kegiatan Litbang Iptek, pengaturan pembinaan dan pengawasan, dan tambahan pengaturan mengenai perjanjian alih material persyaratan perizinan penelitian asing, dan sistem informasi iptek. Namun, beberapa kekhawatiran dan harapan tetap dilontarkan dari berbagai pihak, (Pansus, LIPI, dan Organisasi Penelitian lainnya). Pasalnya, beberapa UU sebelumnya dirasa belum mampu mengakomodasi kenyataan di lapangan, apalagi setelah Presiden Joko Widodo dan Kepala Bappenas mengatakan Lembaga Litbang telah menghabiskan 209 triliun namun tidak ada *output* yang signifikan.

Berbagai harapan dan masukan sebegitu dan seideal apapun sebenarnya pada akhirnya kembali pada implementasi UU tersebut, apakah memang mau memajukan riset Indonesia, atau hanya perdebatan panjang idealisme belaka? Kita tunggu saja penantian UU tersebut yang entah kapan disahkan itu. (IFR)

■ Dalam forum meredeka barat Kemenperin mendorong anggaran riset Indonesia naik menjadi 2 persen dari PDB. PHOTO/REPUBLIKA.



## WACANA PENGHAPUSAN BPP



BPP PROVINSI SUMATERA BARAT

# Targetkan 1 OPD 10 Inovasi

*Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat baru saja terbentuk pada 2017 lalu, meski begitu banyak kegiatan dan inovasi yang hendak dirancangnya. Bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan 1 OPD, 10 Inovasi. Sehingga tidak aneh ketika Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi percontohan bagi inovasi lainnya dalam acara Rakornas Kelitbangan 2018 yang diselenggarakan BPP Kemendagri. Seperti apa perjalanan dan jatuh bangun mereka? Tim Media BPP telah menghimpunnya dalam liputan Rakorda Kelitbangan Sumatera Barat pada awal Mei 2018 lalu.*

**L**AHIRNYA PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan seluruh daerah di Indonesia untuk berinovasi, terutama melalui peran BPP dalam kebijakan dan pelayanan sosial, hal itu juga sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi kebijakan umum dari kebijakan pelaksanaan PP Inovasi Daerah. Untuk itu, kegiatan inovasi seolah kini menjadi kegiatan mendesak tiap daerah agar berpikir kreatif mengembangkan daerahnya masing-masing, termasuk Provinsi Sumatera Barat.

Beruntung, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mendukung maksud baik pemerintah pusat. Bahkan, ia memerintahkan pada setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Sumatera Barat untuk menciptakan 1 OPD 10 Inovasi. “Pak Gubernur mintanya kami

1 OPD 10 Inovasi. Di Sumatera Barat sendiri ada sekira 50-an lebih OPD. Itu artinya Provinsi Sumatera Barat setidaknya harus punya 500 inovasi,” kata Reti Wafda, Kepala BPP Provinsi Sumatera Barat, saat pembukaan Rakorda Kelitbangan Sumatera Barat.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Gubernur Sumbar saat menghadiri acara Rakornas Kelitbangan Kemendagri pada 8-9 Mei di Hotel Mercure, Ancol. Menurutnya, kunci kesuksesan dalam pengelolaan pemerintahan ada di tangan riset. “Dengan sistem yang lengkap, maka pemerintahan daerah itu dapat sukses. Apalagi kalau semua dimaksimalkan dengan hasil riset sehingga tepat sasaran. Saya juga berharap sekali segala kegiatan kelitbangan ini berdasarkan riset yang tepat sesuai dengan kebutuhan Sumatera Barat, tidak ada anggaran yang mubazir, dan dapat mendorong sistem ino-



vasi daerah,” imbuh Irwan.

Irwan sudah mendaftar pada Maret 2018 setidaknya ada 501 inovasi yang sedang berjalan, proses dan direncanakan. “Kami kemudian memetakannya per bagian. Misalnya dalam pelayanan publik instruksi presiden meminta agar seluruh daerah mempermudah atau mempercepat proses pelayanan yang selama ini lama dan berbelit-belit. Misalnya dari 10 pintu jadi satu pintu, tidak perlu banyak izin, hanya satu saja sudah menampung. Hal semacam ini yang akan kita terus tingkatkan dalam pelayanan publik,” tambahnya.

**Fokus pertanian**

Sebenarnya, ada banyak sekali kajian yang sedang dilaksanakan oleh BPP Sumbar dalam hal inovasi pelayanan publik dan permasalahan sosial. Misalnya, ada kajian mengenai varietas unggul padi dalam jumlah lebih banyak untuk masyarakat, lalu masalah banjir di beberapa kabupaten di Sumbar, atau masalah produk unggulan di sana, seperti Kopi Arabika, dan bahan olahan Balado.

Sebab menurut Irwan, Sumatera Barat merupakan daerah agraris yang anggarannya banyak dipusatkan pada sektor pertanian. Jadi harus lebih fokus kajian kelitbangannya di pertanian. “Meski anggarannya terbatas, tetapi BPP Sumbar harus mampu membuat kajian dan inovasi yang lahir dari program kesejahteraan petani. Konsep wilayah di Sumatera Barat ini membangun bidang pertanian. Kesejahteraan banyak disumbangkan dari usaha tani, dan saya melihat BPP Sumbar punya komitmen akan muncul sebuah inovasi dari sini,” puji Irwan.

Hasil kajian BPP Sumbar menurut Irwan, menjadi tolok ukur dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan mengena, meski dengan anggaran yang sedikit. “Anggaran kami hanya 2,6 trilion, namun dengan uang yang sedikit dan harus dibagi-bagi itu kita akan kelola Sumbar dengan maksimal. Meski hasil alam dan ruang sangat terbatas, kita optimis 501 inovasi yang sedang berjalan ini dapat memajukan Sumbar sebagai provinsi yang lebih baik lagi melalui



BPP,” imbuhnya

Supaya anggaran efisien, Irwan mengaku tidak membolehkan BPP Sumbar melakukan riset dengan biaya yang mahal. “Optimalkan dengan SDM yang ada, buat kerja sama dengan BPP, LIPI, Litbang Pertanian, BATAN, dan BPP Kemendagri. Dan *Alhamdulillah*, dengan banyak kerja sama, produk kami banyak terpakai,” ungkapnya.

**Perkuat dengan Rakorda**

Upaya kerja sama dan riset itu juga tercermin manakala *Tim Media BPP* meliputi acara Rapat Koordinasi Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan pada Kamis (3/5) lalu di Hotel Kyriad Bumi Minangkabau, Sumatera Selatan

Seluruh daerah di Sumatera Barat datang berduyun-duyun mengunjungi acara yang membahas langkah dan tindak lanjut BPP Provinsi Sumatera Barat

- **ATAS:** Pertemuan sekaligus Monev Tim Kemenristekdikti, Balitbang Provinsi dengan Walinagari Situjuh Banda
- **BAWAH:** Memfasilitasi pertemuan dan koordinasi dengan OPD terkait, Pemerintah Nagari dan petani cabe di Nagari Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota

dalam hal inovasi daerah, terutama pasca-dilahirkannya PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Beberapa narasumber pun dihadirkan, seperti Danang Binuko (Kepala Sub Bidang pada Pusat Inovasi Daerah BPP Kemendagri), Danang Handoko (Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti), Sasa Sofyan (Deputi Jasa Ilmiah LIPI), dan Syamsir (Rektor Universitas Andalas).

Perwakilan BPP Kemendagri, Danang Binuko hadir sebagai pembicara pertama dalam rangka menyuntikkan semangat inovasi di berbagai sektor usaha dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Ka-



■ **GUBERNUR** Sumatera Barat mendapat penghargaan Leadership Award dari Mendagri pada akhir 2017 lalu

upaten/Kota serta Perguruan Tinggi, dan lembaga-lembaga swasta. “Arah kebijakan kelitbangannya Pemda itu fokus pada mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas internal Balitbangda,” terang Danang.

Menurut Danang, BPP Kemendagri memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan dalam negeri, melakukan fasilitasi inovasi, serta melakukan evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi kelitbangannya. “Untuk pembinaan fungsional peneliti dilakukan oleh LIPI. Kemendagri bersifat mengkoordinasikan calon fungsional peneliti di daerah, melakukan seleksi administrasi kemudian terkait penetapan kelulusan sebagai fungsional peneliti di tetapkan oleh LIPI,” katanya.

Kekurangan peneliti memang menjadi salah satu permasalahan di BPP Sumbar. Pasalnya, setelah beubah menjadi Badan yang berdiri sendiri pada 2017, BPP Sumbar hanya memiliki 4 peneliti. Terdiri dari 1 Peneliti Madya, dan 3

ma tenaga tersebut sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” lanjut Reti

Apalagi di tingkat Provinsi juga masih perlu penguatan di Kabupaten/Kota dalam hal SDM dan Penguatan kapasitas. Perlu penguatan kerja sama dan sinkronisasi program kelitbangannya antara lembaga litbang dan pemerintah daerah serta bisnis, sehingga pemanfaatan hasil-hasil kelitbangannya lebih maksimal dan dapat meningkatkan daya saing daerah.

“Lembaga kelitbangannya daerah dan perguruan tinggi perlu memaksimalkan upaya untuk memperoleh dana Pemerintah Pusat (LIPI, Kemendagri dan Ristekdikti) melalui pengajuan proposal yang kompetitif,” terang Reti.

Apalagi banyak BPP Kabupaten/Kota yang mengeluhkan sulitnya dalam pengajuan proposal untuk memperoleh dana penelitian adalah keterbatasan SDM peneliti pada bidang terkait. “Misalnya Kota Sawahlunto saat ini sedang menunjukkan proposal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui pembangunan *waterboom* yang berbeda dengan daerah lain. Kami mengalami kendala dalam mencari peneliti yang terkait bidang tersebut,” kata salah seorang peserta dari Sawahlunto.

Meski banyak kendala yang harus dihadapi pada badan yang baru terbentuk setahun itu, Reti dan seluruh pejabat BPP Sumbar tetap optimis, melalui BPP dapat tercipta inovasi dan perkembangan daerah. “Kami tetap yakin dan optimis dapat memajukan Sumatera Barat melalui hasil riset dan kebijakan, apalagi Gubernur sangat mendukung peran kami, meski di tengah keterbatasan SDM dan anggaran,” keukeuh Reti mengakhiri pembicaraan. (IFR)

**“** **KEKURANGAN PENELITI MENJADI SALAH SATU PERMASALAHAN DI BPP SUMBAR. BPP SUMBAR HANYA MEMILIKI 4 PENELITI.**

Peneliti Pertama. “Ada juga tiga calon peneliti yang sedang dilatih. Kami berharap ada beberapa peneliti yang bisa bergabung di kami, mengingat banyaknya kajian yang kami perlukan,” terang Wempie Yuliane, salah seorang peneliti di BPP Sumbar.

Apalagi garis besar RIK (Rencana Induk Kelitbangannya) BPP Sumbar mengacu pada isu strategis bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan, ekonomi dan pembangunan daerah, sosial dan kemasyarakatan, serta infrastruktur dan kebencanaan. “Tentu kami juga berharap dari rakor kelitbangannya ini, ada upaya dari BPP Kemendagri mendukung peningkatan SDM di kami. Kami juga berharap Pak Danang dan Tim BPP memberikan masukan dalam penyempurnaan rencana induk kami, untuk mendukung pencapaian target Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun ke depan,” terang Reti Wafda, Kepala BPP Provinsi Sumatera Barat

Reti juga mengatakan, BPP Kemendagri perlu mendorong penambahan personil peneliti serta meningkatkan kapasitas peneliti melalui kegiatan diklat dan bimtek yang serius dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas untuk pembangunan daerah. “Kebutuhan peneliti di daerah itu juga harus terintegrasi dengan kebutuhan Provinsi Sumatera Barat sehingga OPD dapat menerimi-

## DAERAH

# Menjelajah Negeri Minangkabau

*Pesona Padang, Sumatera Barat memang tidak jauh dari pesona keindahan pantai dan beberapa danau atau sungai di tengah himpitan Rumah Gadang. Tidak hanya sekedar pantai, tetapi tiap pantainya juga memiliki keindahan tersendiri dan legenda khas Minangkabau. Seperti apa? Yuk simak perjalanan Tim Media BPP saat mengunjungi Negeri Minang ini*

SEBAGAI ibu kota provinsi Sumatera Barat, Padang memiliki ragam budaya yang kental hingga saat ini. Tidak hanya itu, kota yang pernah diguncang gempa hebat pada 2009 ini ternyata juga menyimpan potensi wisata yang menakjubkan. Tempat wisata di Padang memiliki banyak pilihan mulai dari wisata alam sampai wisata sejarah. Sepanjang pantai menimbulkan sosok Kota Padang sebagai 'wisata panas' karena terik matahari di pinggir pantainya, sedangkan untuk berteduh atau cuaca yang dingin, pilihan yang tepat adalah Bukittinggi, sekira dua jam dari Kota Padang.

## Pantai Malin Kundang

Jika liburan ke Padang wajib hukumnya mampir ke Pantai Air Manis. Pantai ini terletak di kelurahan Air Manis, keca-

matan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat. Kenapa wajib? Sebab pantai ini tengah populer lantaran kisah legenda rakyat Malin Kundang yang begitu melegenda.

Salah satu *tour guide Tim Media BPP*, Budi Rifelino mengisahkan, sebenarnya kisah Malin Kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu itu mungkin hanya sekedar hikayat pelajaran karya sastrawan Minang ternama di sana. "Tapi memang fungsinya adalah untuk pelajaran anak-anak Minang yang banyak merantau pada saat itu, agar tidak lupa

pada ibunya," kata Uda Budi.

Di sekitar Batu Malin Kundang juga ada bebatuan besar yang tersebar. Konon batu-batu tersebut adalah kapal besar milik si anak durhaka. Konon, Malin Kundang dan kapalnya yang sudah jadi batu itu ada di Pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Lokasi Pantai Air Manis terletak 15 kilometer dari pusat Kota Padang.

Pantai Air Manis menjadi identik dengan legenda Malin Kundang karena adanya bongkahan batu yang mirip Malin Kundang. Jika ombak besar meng-

hantam batu tersebut, percikan airnya sangat tinggi, dan bunyinya seperti orang meraung-raung. Kadang terdengar seperti orang meratap dan meyesali diri. Suaranya sungguh memilukan hati.

Padahal, tidak semua orang setempat percaya bila bebatuan yang ada di sana berasal dari cerita legendaris itu, melainkan hanya batu-batu yang sengaja dibentuk sedemikian rupa untuk membuat Pantai Air Manis jadi lebih terkenal. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita Malin Kundang, Pantai Air Manis merupakan objek wisata yang wajib di-





■ **ATAS:** Jembatan Panjang Padang di malam hari. PHOTO/500PX.COM/PHOTO/62483293

■ **BAWAH:** Berfoto di depan tugu padang di Pantai Padang. FOTO/ISTIMEWA

kunjungi saat berkesempatan melancong ke Padang.

Selain itu, pantai ini sendiri sebenarnya memiliki panorama yang indah dengan pasirnya yang putih serta memiliki air laut yang jernih. Di tengah laut terdapat sebuah pulau kecil yang asri bernama Pulau Pisang. Saat surut, pengunjung bahkan bisa jalan kaki hingga ke pulau kecil seluas satu hektar itu. Untuk ma-

kami.

Menurut Budi, museum ini merupakan salah satu museum terpenting yang mengangkat sejarah masyarakat Minangkabau dan peninggalan kebudayaan mereka sejak masa prasejarah hingga era modern. Di sini kita dapat mengenal berbagai pernak-pernik kehidupan masyarakat Minang dari koleksi yang dimilikinya.

Museum Adityawarman terletak di pusat kota, yakni Jalan Diponegoro. Berdiri di tengah lahan seluas 2,6 hektar, museum ini dibangun dengan mengambil inspirasi arsitektur dari rumah Bagong atau Rumah Gadang yang merupakan ciri khas gaya arsitektur tradisional Minangkabau.

Rumah Bagong sendiri merupakan rumah panggung dengan atap meniru bentuk seperti tanduk kerbau yang bertumpuk. Jumlah *gonjong* yang ada di atap museum ini sendiri berjumlah tujuh pucuk.

Pemberian nama 'Adityawarman' diambil dari nama salah satu raja yang pernah berkuasa di Minangkabau. Dalam tinjauan sejarah, Raja Adityawarman merupakan salah satu raja Minangkabau yang berasal dari trah kebangsawanan Majapahit. Raja Adityawarman sendiri diperkirakan berkuasa pada era yang sama dengan periode sejarah saat Gajah Mada menjabat sebagai Mahapatih.

Museum ini memiliki referensi peninggalan sejarah yang cukup beragam tentang berbagai aspek kebudayaan Minangkabau dan Sumatera Barat. Terdapat lebih dari 6000 koleksi peninggalan budaya, yang terbagi menjadi 10 kategori koleksi.

Di antara koleksi tersebut terdapat koleksi jenis-jenis perhiasan tradisional, pernak-pernik busana, instrumen musik, replika sajian kuliner khas dalam berbagai upacara adat dan berbagai perkakas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Minangkabau. Pengunjung yang datang ke sana, bahkan bisa mencoba mengenakan baju adat khas Minangkabau dengan sewa Rp50 ribu saja per sekali

suk ke dalam kawasan wisata Pantai Air Manis, kami harus membayar biaya sebesar Rp5 ribu. Rutenya melewati jalan raya Teluk Bayur dengan menaiki mobil yang kami sewa.

Setelah puas bermain air di pantai, kami lantas melanjutkan perjalanan ke Kota Padang mengunjungi Museum Adityawarman.

#### Museum Adityawarman

Selain daya tarik wisata alam dan kulinernya, Sumatera Barat juga memiliki sejumlah objek wisata pendidikan dan kebudayaan yang juga layak untuk disambangi. Dari sekian banyak objek wisata pendidikan tersebut, Museum Adityawarman menjadi referensi utama

pakai. Rekan kami coba mengenakan busana khas Minang yang biasa digunakan dalam acara sakral seperti pernikahan khas Minang, Sumatera Barat.

Setelah lelah berkeliling dan mencoba baju khas Minang dan Suntiang, kami langsung bergegas ke lokasi selanjutnya.

#### Pantai Padang

Pantai Padang punya keunikan lain selain pantai di Bali atau pantai pada umumnya di Indonesia yang terletak langsung di pinggir laut Samudera Hindia. Memunyai batu yang disusun rapi sebagai pemecah ombak. Santai ke pantai adalah pilihan yang sangat tepat untuk menghabiskan sisa waktu terakhir kami di Padang.

Pemandangan pantai Padang yang bisa dinikmati langsung dari jalan raya kota Padang. Keindahan luasnya Samudera Hindia terlihat lantang di depan mata ketika kami melewati Jl. Samudera yang dihiasi dengan batu grip yang bersusun tertata di sepanjang pantai. Hal ini menjadikan Pantai Padang jadi objek paling gampang diakses jika sudah sampai di pusat Kota Padang.

Posisi pantai yang berada sebelah Barat ini pun sangat nyaman untuk bersantai bersama. Sembari menikmati Pantai Padang merupakan salah satu tempat wisata favorit di Kota Padang, baik untuk wisatawan lokal maupun *tourist* mancanegara.

Pantai Padang ini populer dengan nama *Taplaw*, kata yang disingkat dari Tapi Lawik (tepi laut) yang terletak pada kawasan perkotaan yang juga berada di pinggir pantai. Daerah ini termasuk dalam Kecamatan Padang Barat yang membentang dari daerah Purus hingga Muara Batang Arau yang juga terkenal dengan Jembatan Siti Nurbaya-nya.

Sangat banyak pesona alam yang sayang dilewatkan jika berwisata ke kawasan Pantai Padang. Tentunya karena pantai Padang memiliki keunikan dari pantai pada umumnya, *batu grip* adalah salah satunya. Bebatuan ini berfungsi untuk memecah ombak yang datang dari Samudera Hindia, benturan ombak ini menciptakan gemuruh yang men-



jadi pemecah suasana. Tidak jauh dari pantai ini Anda bisa duduk santai menikmati angin yang berhembus sambil ber-*selfie* di sebuah papan bernama Padang.

#### Jembatan Siti Nurbaya

Sebelum perjalanan pulang ke Jakarta melalui Bandara Minangkabau, kami sempatkan dulu untuk *selfie* di Jembatan Siti Nurbaya

Cerita tentang Siti Nurbaya menjadi legenda menarik untuk diperbincangkan. Menurut Budi legenda yang berasal dari "Kota Sambalado" alias Kota Padang ini, mengisahkan tentang cinta tak sampai yang berakhir dengan "nikah paksa". Terlepas dari legenda, jembatan Siti Nurbaya ini, menurut Budi, jembatan ini menjadi menghubungkan Kota Padang dengan sebuah gunung kecil yang dari kejauhan bisa terlihat kuburan-kuburan yang seolah bertumpukan yaitu Gunung Padang.

Wilayah Kota Padang yang terhubung langsung dengan gunung ini adalah kota tuanya. Berisi bangunan tua sejak zaman Belanda, kampung China yang banyak sekali rumah adat dengan khas warna merah dan patung-patung besar yang konon menurut Budi sangat horor, apalagi pasca gempa bumi 2009. Banyak bangunan tua yang sengaja dikosongkan setelah melewati jembatan ini.

Di bawah jembatan pun terdapat muara Batang Arau yang ujungnya adalah pan-

■ Pantai Malin Kundang. Di mana legenda yang menceritakan seorang yang mengutuk anaknya menjadi batu, terjadi di pantai ini

FOTO/ISTIMEWA

tai Padang itu sendiri. Terdapat kapal dan perahu tua yang sedang "bertenger" di tepian membuat lokasi ini menjadi sangat menarik untuk dikunjungi, seolah-olah sedang tidak berada di Indonesia.

Berbicara tentang "Bukit Mayat" ini, konon katanya di puncak Gunung Padang tersebut terdapat makam yang dipercaya sebagai makam Siti Nurbaya. Beberapa meter di bawah puncak sampai dengan titik bawah gunung, dihiasi dengan banyak batu nisan dan rumah-rumah warga yang berwarna-warni. Beberapa sumber juga mengatakan, sebenarnya jika bukit tersebut dibedah lebih dalam, lebih banyak lagi kumpulan mayat tak beridentitas terkubur di dalamnya.

Oleh karena itu, destinasi wisata ke Jembatan Siti Nurbaya ini bisa dibilang komplit alias "3 in 1". Karena dengan mengunjungi wilayah jembatan ini, akan terlihat Gunung Padang yang berisi banyak kuburan, lalu di seberangnya ada "kota tua" khas Padang, serta melihat *sunset* dari muara yang terhubung langsung ke Pantai Padang, dan ditambah kapal-kapal keren yang memanjakan mata. (IFR)

## Mendagri Keluarkan Pedoman THR dan Gaji ke-13



JAKARTA – Untuk menjamin kelancaran pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke 13, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat Nomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-14. Surat edaran ini menjadi petunjuk teknis atau pedoman bagi daerah saat mengeluarkan anggaran untuk THR dan gaji ke 13 yang bersumber dari APBD.

“Surat tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin, di Jakarta, Senin (4/6). Menurut Syarifuddin, surat edaran dikeluarkan Mendagri, agar Pemda punya pedoman bagaimana teknis pengeluaran anggaran untuk THR dan gaji ke 13.

“Surat edaran Mendagri ini memberikan penjelasan teknis terkait pemberian THR dan gaji ke-13 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 19 Tahun 2018,” katanya. Dengan tegas pula, Syarifuddin mengatakan, surat edaran itu bukan berisi instruksi. Tapi berisi penjelasan berupa petunjuk teknis bagi Pemda.

Surat edaran dikeluarkan menindaklanjuti PP yang telah di-

buat. Bagaimana Pemda mengalokasikan dan mengelola anggarannya terkait pemberian THR dan gaji ke-13, dijelaskan rinci dalam surat tersebut. Dalam surat itu juga dijelaskan komponen-komponen apa saja yang masuk dalam penghitungan THR dan gaji ke-13.

Pemberian THR dan gaji ke 13 itu sendiri dibebankan pada APBD masing-masing daerah. “Saya mewanti-wanti agar daerah harus lebih teliti dalam penganggaran THR dan gaji ke 13 tersebut. Saya rasa daerah sudah menganggarkan semua itu. Karena untuk gaji ke 13 dan keempat belas sudah kami masukkan dalam pedoman APBD agar dianggarkan oleh masing-masing daerah.

Kalau belum, maka bisa diambil dari sumber lain, antara lain dari sumber tidak terduga,” urai Syarifuddin. Syarifuddin mengungkapkan, ada delapan poin yang harus diperhatikan daerah dalam pemberian THR dan gaji ke 13. Dalam surat Mendagri disebutkan dengan jelas, bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD serta PNS daerah diberikan THR dan gaji ke 13.

Dananya dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018. Pemberian THR diupayakan dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2018 yakni sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018. Sementara pemberian gaji ke-13 diupayakan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juli 2018 sebesar penghasilan bulan Juni 2018.

“Adapun penghasilan yang menjadi komponen penghitungan besaran THR dan gaji ke 13 bagi gubernur dan wakil gubernur serta pimpinan dan anggota DPRD meliputi gaji pokok atau uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan,” ujarnya. Sementara, penghasilan yang menjadi komponen penghitungan besaran THR dan gaji ke 13 bagi PNS daerah, lanjut Syarifuddin, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Dan tambahan penghasilan PNS daerah atau tunjangan kinerja. Penghasilan THR dan gaji ke 13 tersebut tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain, kecuali pajak penghasilan yang dibebankan pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan. (KORAN JAKARTA)

## Sejumlah Daerah Mulai Kejar Penerbitan Kartu Identitas Anak

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menargetkan semua kabupaten/kota mulai menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019 mendatang. Untuk itu, secara kebijakan anggaran diharapkan sudah mulai dirancang pada APBD perubahan 2018.

Menyambut kebijakan pemerintah pusat, sejumlah daerah sudah mulai mengejar penerbitan KIA. Identitas diri yang diperuntukkan bagi anak usia 0 sampai 17 tahun ini sudah diterapkan di beberapa daerah.

Di Kabupaten Minahasa Utara (Mitra), tahun ini KIA akan diberikan kepada 25 anak. Hingga akhir Mei lalu, Mitra sudah menyerahkan KIA kepada 4 ribu anak.

“Di Mitra hingga akhir Mei baru empat ribu anak yang diperoleh. Tetapi kami optimistis dapat mencetak 25 ribu keping KIA pada tahun ini,” jelas Kepala Dinas Dukcapil Mitra David Lalandos, Kamis (31/05/2018).

Dari target 33 ribu wajib KIA di Mitra, David menyatakan pihaknya masih menyisahkan pemberian KIA bagi 29 ribu anak.

“Blangko sendiri hingga saat ini masih cukup. Ada sekira lima ribu blangko KIA yang belum digunakan,” jeasnya.

Untuk mengejar target, Dukcapil Mitra berencana melakukan pengadaan blangko sebanyak 15 ribu untuk mengantisipasi kekurangan.

Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Dinas Dukcapil setempat terus memacu percepatan pencetakan KIA.

“Untuk tahap pertama ini, Dukcapil Bolsel mendapatkan 10.000 blangko KIA. Ini sudah kami hitung tak akan cukup, karena perhitungan tahun ini jumlah anak yang

menerima KIA ada sepuluh ribu lebih,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil Gunawan Otuh, Kamis (31/05/2018).

Perlu diketahui, KIA merupakan identitas resmi yang memiliki kekuatan secara hukum bagi anak yang diatur dalam Permen-dagri Nomor 2 Tahun 2016.

Pemerintah melalui Ditjen Dukcapil memberikan dana stimulus KIA kepada 150 kabupaten/kota yang memiliki cakupan Akta Kelahiran tertinggi tingkat provinsi.

Sementara tahun 2016 dan 2017 ada masing-masing 50 kabupaten kota yang mendapatkan alokasi anggaran pusat. Sisanya 5 kabupaten/kota menganggarkan melalui APBD pada tahun lalu.

Dengan demikian, hingga kini ada 305 kabupaten/kota yang sudah menerapkan KIA, baik melalui APBN maupun APBD. Sisanya, 206 kabupaten/kota akan menerapkan KIA pada tahun 2019, bisa dari anggaran pusat maupun anggaran daerah. Dukcapil. (Puspem Kemendagri)



HERI BUDIANTO, DIREKTUR POLCOMM INSTITUTE

# TUKANG SURVEY DARI BENGKULU



**P**ADA 18 Mei 2018 lalu, lembaga survei Political Communication (Polcomm) Institute merilis hasil survei bertajuk “Generasi Milenia: Ke Mana Arah Politik dan Siapa Capres Pilihan Mereka?” Dalam hasil survei tersebut, Polcomm menyebutkan PDI Perjuangan (PDIP) menempati posisi teratas dalam urutan Partai Politik (Parpol), jika pemilihan umum dilaksanakan pada tahun ini.

Sedangkan Gerindra berada di posisi kedua dengan perolehan persentase sebanyak 16,67 persen, diikuti Partai Golkar sebesar 11,33 persen. Baru disusul pada urutan selanjutnya terdapat Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Survey ini digawangi oleh Direktur Polcomm Institute sendiri, yakni Heri Budianto, seorang akademisi yang dikenal sebagai ‘tukang survey’. Menurut Heri, survei tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *purposive random sampling* dengan memilih pemilih pemula dan berusia muda rentang usia 17 hingga 40 tahun. Polcomm melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi melalui wawancara langsung secara tatap muka dengan para responden pada 3-6 Mei lalu, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan *margin error* 2,83 persen. “Dari hasil tersebut kami mendapatkan, Partai Demokrat mendapat 5,83 persen, disusul PAN 2,83 persen dan PKS 2,08 persen,” kata Heri.

Kemudian partai baru yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menempati urutan terakhir dengan hanya memperoleh

0,17 persen. Menurut Heri, Joko Widodo masih ‘merajai’ hasil survei terkait calon presiden (capres) 2019. Berdasarkan survei yang dilakukannya, elektabilitas Jokowi masih merupakan yang tertinggi dengan 44,83 persen. Sementara itu rival terdekatnya, Prabowo Subianto menempati urutan kedua dengan perolehan elektabilitas sebesar 31,57 persen. “Pilihan pemilih kategori ini menjawab secara langsung (*Top of Mind*) ketika ditanya siapa capres yang dipilih jika Pilpres dilaksanakan tahun ini,” katanya.

Heri menambahkan nama-nama lain bisa saja muncul sebagai petarung Jokowi, seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebesar 8,42 persen, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta sebesar 3,08 persen, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan 2,92 persen, dan AHY sebesar 2,58 persen. Namun hasil surveynya menunjukkan bahwa kebanyakan kaum muda (generasi millennial) lebih menyukai cara Jokowi yang dekat dengan rakyat. “Kelebihan Jokowi saat ini, anak muda bilang Pak Jokowi dekat dengan rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, berbagai survey dan pendapat dari Heri Budianto kerap kali menjadi acuan media, ia dikenal sebagai pengamat politik dan sosial di Indonesia. Polcomm institute sendiri dibentuk oleh Heri pada 2013, dan bergerak di bidang survey dan konsultan politik. “Tujuannya adalah untuk mempertajam pengalaman dan pengetahuan di bidang politik bangsa,” tutur Heri.

Selain dikenal sebagai ‘tukang survey, nama Heri kerap aral melintang di layar kaca TV berita sebagai putra Bengkulu yang sangat aktif berorganisasi, terutama dalam bidang pendidikan. Heri lahir di Bengkulu pada 2 september 1974 silam. Pria yang sebagian kepalanya mulai membotak itu memiliki cita-cita tinggi dan talenta di bidang organisasi. Bahkan keaktifannya mulai terlihat sejak SMP dan SMA. Pada tingkat universitas pun, ia

pernah menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan pada Fakultas Sosial Politik di Universitas Bengkulu.

Keaktifan Heri juga ditunjukkan pada pengalaman bekerja, di antaranya pernah menjadi penyiar radio sejak SMA dan lulus sarjana ia juga pernah menjadi wartawan di media cetak. “Tidak lama setelah menjadi wartawan, saya kemudian melanjutkan studi magister di IPB (Institut Pertanian Bogor) pada Bidang Komunikasi Pembangunan,” ceritanya.

“**BERBAGAI SURVEY DAN PENDAPAT DARI HERI BUDIANTO KERAP KALI MENJADI ACUAN MEDIA, IA DIKENAL SEBAGAI PENGAMAT POLITIK DAN SOSIAL DI INDONESIA. POLCOMM INSTITUTE SENDIRI DIBENTUK OLEH HERI PADA 2013, DAN BERGERAK DI BIDANG SURVEY DAN KONSULTAN POLITIK. TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEMPERTAJAM PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN DI BIDANG POLITIK BANGSA.**

Pada saat itu talenta organisasinya semakin terasa, dengan terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Forum Mahasiswa Pasca Sarjana di IPB. Keaktifan Heri juga mengantarkan dia untuk bergabung menjadi dosen pada Perguruan Tinggi Swasta, Universitas Mercubuana pada 2004, di sini lah ia memulai fokus karirnya pada dunia pendidikan.

Dari Mercubuana, Herie lantas terpilih sebagai ketua umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) Pusat periode 2016-2019 saat dirinya menjabat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Ia berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan ketua umum pada Kongres Aspikom IV 2016. Heri bahkan mengalahkan Dadang Rahmat, Dekan Fikom Universitas Padjajaran Bandung sebagai ketua Aspikom dengan persentase 93 – 63 suara.

“Saya berharap sekali semua bersinergi membangun Aspikom. Program studi Ilmu Komunikasi seluruh Indonesia harus mampu menjawab tantangan persaingan global dan mampu melahirkan kurikulum pendidikan tinggi ilmu komunikasi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Mencetak calon-calon sarjana dan pasca sarjana D3, S1, S2, dan S3 di bidang Ilmu Komunikasi sesuai dengan kebutuhan industri komunikasi dunia,” harapnya.

Tidak hanya dalam hal pendidikan tinggi, di Bengkulu, Heri juga membuat sekolah karakter tingkat TPA (Taman Pendidikan Anak) dan SD (Sekolah Dasar) bagi siswa-siswi yang tidak mampu. “Impian saya sederhana, saya ingin pendidikan di Indonesia berkarakter dan maju,” ungkap pria yang hobi berolahraga ini.

Pada 2009 Herie kemudian melanjutkan studi doctoral di UGM (Universitas Gajah Mada) pada Bidang Media dan Kajian Budaya, ia menyelesaikan studi doctoral nya pada 2013 dan kemudian langsung aktif menjadi analis di berbagai media elektronik. Kiprahnya menjadi pakar politik di tingkat nasional membuatnya kerap satu panggung dengan tokoh-tokoh nasional besar. “Jangan tanya apa yang negara bisa kasih ke kita, tapi apa yang bisa kita kasih ke negara,” tutupnya mengakhiri pembicaraan. (IFR)

# TRILIUNAN VIRUS JATUH DARI LANGIT SETIAP HARI

SETIAP hari, 800 juta virus mengalir ke setiap meter persegi planet ini. Sebagian besar menyebar ke udara sedangkan sisanya sampai ke manusia dalam badai debu. Pernahkah Anda penasaran darimana virus berasal? Para peneliti di Spanyol kini mengetahui di mana virus-virus tersebut berasal.

Sebenarnya, para ilmuwan telah lama menduga adanya aliran virus yang mengelilingi bumi. Tepatnya, aliran virus ini berada di atas sistem cuaca bumi tapi di bawah alur perjalanan maskapai pesawat. Sayangnya, hanya sedikit orang yang mempelajari bidang ini. Inilah mengapa hanya jumlah virus yang diketahui oleh tim Spanyol mengejutkan banyak pihak.

Temuan para peneliti Spanyol, setiap hari, setidaknya 800 juta virus mengalir ke setiap meter persegi planet ini. Sebagian besar virus menyebar ke udara melalui semprotan air laut, sedangkan sebagian kecil sampai pada manusia dalam badai debu. "Tanpa terhalang oleh gesekan dengan permukaan Bumi, Anda bisa melakukan perjalanan jarak jauh dan antar-benua dengan mudah," ujar Curtis Suttle, ahli virus di University of British Columbia, Kanada dikutip dari New York Times

"(Untuk virus), bukan hal luar biasa menemukannya tersapu dari Afrika hingga ke Amerika Utara," lanjutnya.

Penelitian Dr Suttle dan koleganya ini merupakan yang

pertama dalam menghitung jumlah virus yang jatuh ke Bumi. Hanya saja, penelitian yang dipublikasikan dalam *International Society of Microbial Ecology Journal* ini tidak dirancang untuk menghitung virus tertentu tapi jumlah keseluruhan yang disebut "virosphere".

Umumnya, diasumsikan bahwa virus yang berasal dari bumi terbang ke atas. Tapi beberapa peneliti berteori bahwa virus mungkin sebenarnya berasal dari atmosfer. Virus dan mangsanya punya peran besar dalam ekosistem dunia. Banyak penelitian yang ditunjukkan untuk memfaktorkan proses virus ke dalam pemahaman kita tentang bagaimana bumi bekerja.

"Jika Anda bisa menimbang semua materi yang hidup di lautan, 95 persennya adalah hal yang tidak bisa Anda lihat, dan mereka bertanggung jawab untuk menyediakan setengah jumlah oksigen di planet ini," kata Suttle.

Dalam percobaan di laboratorium, Suttle mencoba memfilter virus dari air laut dan memisahkan mangsanya yaitu bakteri. Ketika hal ini dilakukan, plankton di air mulai berhenti tumbuh. Alasannya adalah virus menginfeksi salah satu spesies mikroba, mereka membebaskan nutrisi di dalamnya seperti nitrogen. Ini kemudian memberi makan spesies bakteri lain.

Cara ini sama dengan seekor rusa yang dibunuh oleh serigala. Sisa tubuh rusa menjadi makanan bagi gagak dan spesies lainnya. Dalam kasus virus dan mikroba, plankton tumbuh dari nutrisi yang dibebaskan. Ketika plankton tumbuh, mereka mengambil karbon dioksida dan menciptakan oksigen yang penting bagi kehidupan di bumi.

Penelitian ini juga memperkirakan bahwa virus di lautan menyebabkan triliunan infeksi setiap detiknya. Hal ini menghancurkan sekitar 20 persen dari semua sel bakteri di laut tiap harinya. (IFR/National Geography)

## Agar Otak Tetap Bekerja Optimal

OTAK merupakan organ yang paling vital di dalam tubuh, otak juga disebut sebagai pusat kendali organ tubuh lainnya. Dengan begitu, itulah mengapa kita perlu menjaga otak dengan baik agar tetap bekerja optimal. Untuk menjaga kesehatan otak, makanan memainkan peran disana. Makanan yang dianjurkan bisa menjaga kesehatan otak dan bisa meningkatkan memori dan konsentrasi. Melansir *Healthline*, berikut daftar makanan sehat yang bisa meningkatkan otak.

### IKAN

Berbicara tentang kesehatan otak, ikan biasanya berada daftar paling atas. Jenis ikan berlemak memang menjadi solusi untuk menjaga kesehatan organ ini. Seperti salmon, sarden, ikan trout, dan ikan lain yang memiliki asam lemak omega-3.

Perlu kita tahu jika 60 persen dari otak terbuat dari lemak, dan setengah dari lemak itu berjenis omega-3. Otak kita menggunakan omega-3 untuk membangun sel otak dan saraf. Disebutkan jika lemak ini sangat penting untuk belajar dan mengingat serta membantu menangkal penyakit Alzheimer.

Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang makan ikan panggang secara teratur memiliki lebih banyak materi abu-abu di otak mereka. Materi abu-abu mengandung sebagian bersel-sel saraf yang mengontrol pengambilan keputusan, memori, dan emosi.

### BLUEBERRY

Buah segar ini memberikan banyak manfaat kesehatan termasuk beberapa kasus yang terkait dengan otak. Blueberry dan buah-buahan berry berwarna lainnya mengantarkan anthocyanin, yang merupakan sekelompok senyawa tumbuhan dengan efek anti-inflamasi dan antioksidan. Beberapa antioksidan dalam blueberry telah ditemukan menumpuk di otak dan membantu meningkatkan komunikasi antara sel-sel otak.

Penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan jika blueberry membantu meningkatkan daya ingat dan bahkan menunda kehilangan ingatan jangka pendek.

### KUNYIT

Bukan cuma untuk kulit, bumbu dapur yang satu ini juga baik untuk kesehatan otak. Kurkumin yang terkandung di dalamnya merupakan bahan aktif yang telah terbukti melancarkan darah ke otak sehingga dapat langsung masuk ke otak dan menguntungkan sel-sel di sana.

Selain itu kurkumin juga membantu meningkatkan daya ingat pada penderita Alzheimer. Bahkan bisa membantu membersihkan plak amiloid yang merupakan ciri khas penyakit ini. Studi juga menemukan jika kurkumin dapat memperbaiki gejala depresi selama 6 minggu.

### BROKOLI

Sayuran hijau ini dikemas dengan senyawa tanaman yang kuat, termasuk antioksidan. Brokoli juga dipenuhi oleh vitamin K yang tinggi. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk membentuk sphingolipids, sejenis lemak yang padat ke dalam sel otak. Beberapa penelitian pada orang dewasa yang lebih tua mengaitkan hubungan vitamin K dengan kondisi memori yang lebih baik. Selain vitamin K, brokoli juga mengandung sejumlah senyawa yang memberikannya efek anti-inflamasi dan antioksidan. Mereka bisa melindungi otak dari kerusakan.

### TELUR

Makanan enak ini merupakan sumber yang baik dari beberapa nutrisi yang terkait dengan kesehatan otak, termasuk vitamin B6 dan B12, folat, dan juga kolin. Kolin adalah mikronutrien penting yang digunakan tubuh untuk menciptakan asetilkolin, neurotransmitter yang membantu mengatur suasana hati dan memori.

Kuning telur adalah salah satu sumber nutrisi yang baik. Asupan kolin yang cukup yakni 425 mg per hari untuk perempuan dan 550 mg per hari untuk pria.

Sementara vitamin B memiliki beberapa peran dalam kesehatan otak. Mereka bisa membantu memperlambat perkembangan penurunan mental pada orang tua. Karena kekurangan vitamin B, folat, dan B12 telah dikaitkan dengan gejala depresi. Perlu diingat jika hanya ada sedikit penelitian langsung tentang kaitan antara makan telur dan kesehatan otak. Tapi ada penelitian untuk mendukung manfaat penambahan otak dan nutrisi yang ditemukan di dalam telur (IFR/Novagrid.id)



Gaya  
Hidup



# MENJADI DRIVER ATAU PASSENGER?

INDONESIA tengah memasuki masa di mana bonus demografi akan segera terjadi. Tepatnya pada 2045. Pada saat itu, 70 persen penduduk Indonesia diprediksi berada dalam usia produktif. Selain itu, pertumbuhan kelas menengah menjadi kesempatan besar bagi Indonesia. Tentu saja Indonesia bergantung pada generasi emas yang notabene anak-anak muda, untuk bersaing di pasar bebas. Namun, hingga saat ini sebagian besar dari mereka masih terbelenggu orang tua, mitos dan dirinya sendiri.

Hal ini yang kemudian dikemukakan Rhenald Kasali dalam buku motivasinya *Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger?*. Sebelumnya, dia juga sudah membuat buku-buku dalam genre yang sama, yaitu *Recode Your Change DNA*, *Mutasi DNA Powerhouse*, *Myelin*, *Cracking Zone*, *Cracking Entrepreneurs*, *Cracking Values*, *Camera Branding*, dan *Let's Change*.

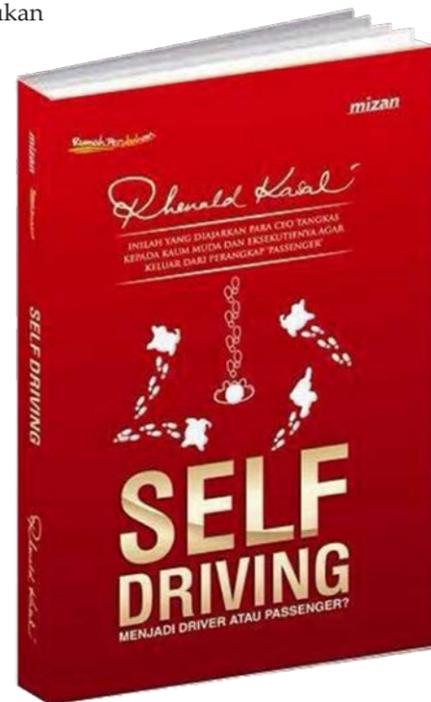
Awalnya sederhana. Rhenald membangkitkan kesadaran pembaca, masing-masing pembaca sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Seperti halnya para mahasiswa di beberapa negara maju yang ia sebut sebagai manusia yang dipersiapkan untuk memajukan perekonomian bangsanya. Ia juga menganalogikan dasar-dasar perubahan di Dubai yang masyarakatnya dipaksa berenang, mengayuh, dan berlari cepat.

Namun mengubah mental bukan perkara mudah. Karena itu, anak-anak ini harus dilepas dari belenggu. Mereka sendiri bisa berusaha untuk berubah, dan melepaskan diri dari belenggu tersebut. Begitu juga orangtuanya. Para orangtua pun harus belajar untuk tidak membelenggu dirinya sendiri dan anak mereka.

Dalam bukunya, Rhenald mengenalkan konsep “*self driving*”. Baginya, “bangsa yang hebat adalah *a driver nation*.” (hal. 7). *Driver nation* hanya bisa dihasilkan dari pribadi yang disebut “*driver*”. Dia sadar, dialah mandataris kehidupan. Di sisi lain, pemimpinnya pun sadar bahwa dia mendapatkan mandat dari rakyat untuk melakukan perubahan.

## Driver atau passenger

Rhenald dalam buku ini membagi ke dalam dua kategori masyarakat yang ada di Indonesia. Mereka adalah *driver* dan *passenger*. *Driver* adalah sekelompok orang yang memiliki intuisi dan minat untuk memimpin, memimpin diri sendiri dan memimpin untuk orang lain. Sedangkan *passenger* adalah sekelompok orang yang gemar menjadi penonton, menerima apa adanya tanpa melakukan sesuatu yang ber-



## SELF DRIVING, MENJADI DRIVER ATAU PASSENGER?

**Penulis** : Rhenald Kasali

**Penerbit** : Mizan

**Cetak** : Januari 2018

**Tebal** : 269 hlm

**ISBN** : 9789794338513

**Harga** : Rp 69.000

guna bagi dirinya maupun orang lain.

Orang-orang dalam kelompok bermental *passenger*, terlebih *bad passenger*, menurut Rhenald, telah mengalami pembentukan karakter yang buruk dalam hidupnya. Akibatnya, seringkali kita temukan orang Indonesia tidak punya keseimbangan antara tutur kata dan tindakan. Ada luka batin yang membuat orang-orang ini cenderung menyakiti orang lain.

Selain “menyerang” tiap pribadi pembaca, Rhenald juga mengkritik berbagai fakta lain yang terjadi di Indonesia. Salah satunya, dia mengkritik sistem pendidikan Indonesia yang kaku dan seolah enggan berkembang. Dia juga secara vokal mengkritik kultur kerja di perusahaan-perusahaan dan pemerintahan.

## Fenomena anak Indonesia

Dalam beberapa bab, Rhenald mengkritik fenomena anak Indonesia saat ini. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi begitu asyik dengan gelar kesarjanaanya. Mereka terpasung di dalam situasi yang gemar menghafal dari pada memahami keilmuannya. Mereka terba-wa oleh situasi yang tidak berpihak kepada keilmuannya, gelar tinggi tidak berimbang dengan kualitas diri. Enggan untuk melepaskan diri dari zona nyaman. Akibatnya mental mereka begitu lemah untuk bersaing dengan mereka yang berani berubah.

Rhenald juga menyinggung pola pikir para sarjana yang hanya terpaku pada buku, namun ketika mereka dihadapkan pada realitas kerja totalitas menjadi *mandeg*. Mereka kalah keterampilan. Ironisnya *ke-mandegan* tersebut diterima dengan *legowo* tanpa ada itikad untuk menggali apa yang menjadi kekurangan. Sifat statis mereka tidak seimbang

dengan pergerakan IPTEK yang dinamis dan berubah (hal. 35).

Selain itu, menurutnya terkadang ada kalanya dapat ditemui di perusahaan, di mana unsur alumni universitas ternama menjadi indikator utama terbaik daripada yang ada untuk menduduki posisi jabatan tertinggi. Asumsi ini perlu mendapat sanggahan bahwa semuanya tidak menjadi ukuran ketika seseorang dihadapkan pada *skill*. Apakah *skill*-nya diiringi dengan kematangannya untuk melakukan inovasi dan per-

“**GELAR TINGGI TIDAK BERIMBANG DENGAN KUALITAS DIRI. ENGGAN UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI ZONA NYAMAN. AKIBATNYA MENTAL MEREKA BEGITU LEMAH UNTUK BERSAING DENGAN MEREKA YANG BERANI BERUBAH.**”

bahan. Penulis menekankan hal itu, sebagaimana langkah untuk mewujudkan sarjana yang agresif bukan pasif.

## Renungan untuk pembaca

Rhenald sukses membawa emosi pembaca. Dengan caranya, dia sukses membuat pembaca berkaca mengenai perjalanan hidup, perilaku, kebiasaan, dan luka-luka batin yang ada dalam diri pembaca. Ia membuka pikiran selama ini, bahwa intelektualitas saja tidak cukup, dan harus diimbangi dengan kreativitas, kedisiplinan, kerjas keras, dan mental yang kuat.

Buku ini bisa menjadi karya bangsa yang baik, memberikan nilai positif

bagi pembacanya. Ini yang menjadi poin terpenting, pembaca memahami konteks yang dimaksud, dan ada amanat yang dapat tersampaikan dari penulis kepada pembaca.

Tidak hanya lewat pengalaman pribadi dan pandangannya, Rhenald juga menceritakan pengalaman hidup dari tokoh ternama. Mulai dari Theodore Roosevelt, hingga Gus Dur. Tiap-tiap tokoh dipilih dengan apik dan cerdas oleh sang penulis. Cerita masing-masing tokoh pun disajikan gamblang, dan pesannya bisa dengan mudah dicerna oleh pembaca. Lewat tokoh-tokoh ini, pembaca bisa belajar, berkaca, bahkan menilai.

Pembaca diberi kebebasan membuat penilaiannya sendiri dan mengasosiasikannya pada kehidupan pribadi. Buku ini tidak hanya berisi rentetan kata dengan huruf yang saling berdempetan. Rhenald menggunakan tanda-tanda visual untuk memudahkan sekaligus menarik perhatian pembaca. Sesekali, dia juga menyisipkan foto dan ilustrasi.

Kesimpulannya adalah berani memilih terhadap keduanya adalah sesuatu yang harus diputuskan. Tak hanya itu, pengalaman pribadi dan perjalanan hidup Rhenald, banyak dituangkan dalam buku ini. Motivasi kepada para pembaca agar dapat mengubah diri, pandai melihat potensi dan tidak terpasung ke dalam bangsa yang feodal, dan bangsa yang tidak siap menerima perubahan.

Dengan demikian, apa yang sudah dituliskan oleh penulis adalah sesuatu yang sangat positif. Melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya, dan yang terpenting adalah sumber inspirasi bagi kaum pemuda untuk tidak terpaku pada keadaan, tetapi berpikir kreatif. (RSK)

# Petualangan di Lautan

## ADRIFT

**Sutradara:** Baltasar Kormákur

**Pemain:** Shailene Woodley,

Sam Claflin,

Elizabeth Hawthorne,

Jeffrey Thomas,

Grace Palmer

**Skenario:** David Branson Smith,

Aaron Kandell,

Jordan Kandell

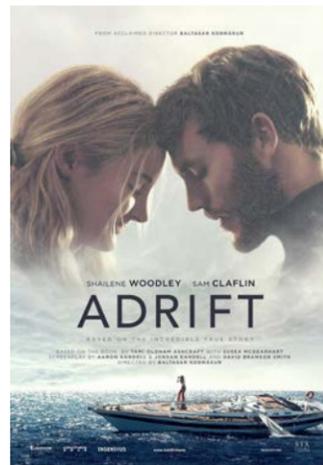
**Produksi:** STX Entertainment

**Tayang:** 1 Juni 2018 (Amerika)

**Durasi:** 120 menit



Satu lagi film kisah nyata yang akan rilis pada Juni 2018 ini adalah "Adrift". Menceritakan petualangan berlayar pasangan kekasih dari laut Tahiti menuju San Diego. Cerita dalam film ini diambil dari kisah nyata yang ditulis oleh Tami Oldham dalam buku *Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea*.



**B**ARU-BARU ini STX Entertainment merilis trailer film terbaru mereka yang akan tayang pada Juni 2018 ini. Kesimpulan trailer yang berdurasi 2,47 menit tersebut menceritakan seorang perempuan yang bertahan hidup di tengah lautan San Diego, Amerika. Adalah *Adrift*, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terilhami dari sepasang kekasih yang baru pertama kali saling mencintai. Mereka kemudian memutuskan untuk bertualang di lautan, karena hobi yang dimiliki keduanya.

Shailene Woodley adalah pemeran utamanya bersama Sam Claflin. Mereka adalah pasangan kekasih yang hendak melakukan petualangan penuh drama dari Tahiti menuju San Diego. Shailene dalam film ini berperan sebagai Tami Oldham, sedangkan Sam berperan sebagai Richard Sharp.

Dalam trailer pendek tersebut di-

citakan Oldham jatuh cinta kepada Sharp pelaut berusia 34 tahun, sementara usia Oldham terpaut 10 tahun dari Sharp. Hingga pada akhirnya keduanya bertunangan atas restu orang tua Oldham.

Di akhir September mereka memutuskan berlayar menuju San Diego. Klimaks dalam film ini terjadi ketika pasangan kekasih itu melakukan pelayaran. Awalnya pelayaran mereka sangat menyenangkan dengan laut yang tenang. Mereka yakin, badai tidak akan mengenai perahu mereka karena letaknya yang berada di utara. Namun, kejadian nahas tak bisa dicegah, tiba-tiba badai menghantam kapal. Mereka tidak dapat mengantisipasi ketika kapal berhadapan dengan salah satu badai paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah.

Adegan menegangkan terjadi ketika Sharp mengemudikan kapal di tengah badai tersebut. Semakin menarik ketika trailer film yang disuguhkan sangat detail dan sama-



persis dengan cerita aslinya yang ditulis dalam buku. Seperti ketika mereka menabrak tinggi badai dan berada di tengah-tengah lingkaran gelombang. Sharp menguasai kendali dan mencoba melindungi Oldham. Sharp menyuruh Oldham pergi ke bawah dek kapal dan memintanya meningkatkan tekanan udara.

Di tengah badai di dalam dek kapal, Oldham ternyata tidak dapat melakukan hal lain, dia ambruk dan tidak sadarkan diri, kapal itu pun jatuh ke dalam palung yang dalam. Sayup-sayup lengkingan suara Sharp menghantarnya ke pikirannya sebelum pingsan.

Ketika Oldham terbangun, interior perahu begitu berantakan dan berlumuran darah. Ia pun segera mencari keberadaan kekasihnya, sampai ia tersadar, kapal yang ia tumpangi sudah berada jauh dari lokasi asalnya.

*Adrift* adalah cerita tentang kekuatan seorang perempuan mengatasi keadaan sulit. Di tengah keadaan terpukul ia berusaha menemukan jalan. Di tengah lautan, dengan kejadian dahsyat yang terjadi kepadanya hingga menghilangkan nyawa kekasihnya, serta dengan ketakutan akan badai yang selalu menghantunya.

Seperti cerita dalam buku, Oldham menghabiskan pelayaran selama 41

hari. Bertahan hidup di lautan tanpa bantuan siapa pun. Ia berusaha tanpa putus asa menemukan daratan, dengan penampilan lusuh dan rambut yang kusut. Ia juga harus berusaha bertahan hidup dengan keadaan terapung. Ia selalu berdamai dengan kematiannya.

Dalam keadaan tersebut Oldham selalu berusaha menenangkan diri. Ia selalu yakin, badai pasti berlalu. Tetapi kadang kala sulit baginya untuk melihat keadaan seperti tiang layar perahu yang hancur, mesin kapal tidak beroperasi, tak ada alat komunikasi, suar bantuan tidak berfungsi, diperparah dengan rasa bersalah dan sakit hatinya kepada dirinya sendiri. Oldham kemudian mencoba menggunakan segala pengetahuannya tentang navigasi dan berusaha mengarahkan kapal sampai ke Hawaii.

Baltasar Kormákur, Sutradara film ini dianggap cukup tepat memilih Shailene Woodley dan Sam Claflin sebagai pemeran utama film ini. Kedua aktor tersebut cukup berpengalaman dalam membintangi film-film bergenre drama. Woodley pernah berperan dalam beberapa film seperti *Divergent*, *Insurgent*, dan *The Fault in Our Stars*, sementara Claflin juga pernah membintangi beberapa box office seperti *Me Before You*, *Snow White and the Huntsman*, dan *The Hunger Games: Catching Fire*.

Selain Shailene Woodley dan Sam Claflin, film bergenre aksi drama dan petualangan ini juga diperankan oleh Jeffrey Thomas, Grace Palmer, Elizabeth Hawthorne, Luna Campbell, Aaron Kandell, Jordan Kandell, Baltasar Kormákur, dan Ralph Winter menjadi produser film yang diproduksi oleh Huayi Brothers, Lakeshore Entertainment, dan RVK Studios.

Jika kita membaca buku yang ditulis Oldham, *happy ending* menjadi alur cerita. Oldham bisa kembali tanpa bantuan. Cerita bagaimana ia bisa kembali itulah yang membuat film ini begitu mengesankan. Sharp mungkin pahlawan bagi Oldham karena telah menyelamatkannya, tetapi Oldham adalah pahlawan sesungguhnya, karena ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki keberanian untuk mewujudkan mimpi.

Meskipun kehilangan tunangannya secara tragis di lautan, dia tidak merasa bahwa salah satu dari mereka akan menjalani hidup berbeda. Pada dasarnya film ini bukanlah tentang penyesalan atau keputusan yang buruk. Ini adalah tentang belajar untuk menerima bahwa setiap individu memiliki nasib dan kehidupan mereka sendiri. Pesannya bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Patut ditunggu! (MSR)

# Haji Agam

Oleh: Taufik

PAGI itu gerimis turun di halaman sebuah rumah dengan pekara-angan yang cukup luas. Daun-daun berjatuhan karena hujan yang turun semalaman. Putik-putik bunga tak jadi berkembang, luruh bersama arus air menuju selokan. Bendera kuning yang dipasang di beberapa sudut halaman menjadi lusuh bahkan robek.

Beberapa sanak keluarga sudah berkumpul. Sebagian berkumpul di bawah tenda besar di teras rumah, duduk-duduk di kursi-kursi yang disewa. Sebagian lagi bersila di ruang tengah, di dekat sesosok manusia tak bernyawa yang dibalut kain serba putih. Pada bagian wajahnya ditutup kain putih barjaring. Yang lain seperti tidak peduli, mengobrol asik di depan rumah sambil mengepul asap rokok dan tertawa haha hihi.

Rumah besar tak berpagar yang terletak di sebuah pertigaan jalan itu sedang berduka. Pemilik rumah besar itu wafat. Haji Agam namanya. Seorang pria tua berusia sekira 70 tahun. Walau Haji Agam meninggal saat tengah malam, entah mengapa berita begitu cepat menyebar. Pelayat satu per satu berdatangan. Dan begitu gerimis mulai reda, para pelayat datang lebih banyak lagi. Bukan belasan atau puluhan lagi, melainkan ratusan. Dan akumulasi ratusan orang itu menjadi ribuan orang, tumpah ke sekitar rumah yang diteduhi banyak sekali pohon yang rimbun itu.

Jalanan menjadi penuh kendaraan dan orang. Macet mengular sekira tiga ratus meter dari kediaman almarhum. Isak tangis bagai nyanyian kepedihan yang menyebar menyelimuti pagi itu. Rasa kehilangan yang sangat seolah menjadi lagu sendu. Mereka yang mengenal almarhum seakan merasa kehilangan yang sangat. Wajah dan keramahannya amat dikenali warga Kampung Pandan Wangi. Sosok baik hati itu kini telah pergi untuk selama-lamanya.

\*\*\*

Pergaulannya luwes menyentuh berbagai macam kalangan. Dari yang berpangkat sampai yang tak punya kerjaan. Dari yang berkendara mewah sampai yang tak punya rumah. Ia rajin menyapa mereka dengan keramahan. Haji Agam



juga dikenal sebagai orang yang dermawan dan rajin menyambangi wilayah-wilayah yang minus. Dan tak lupa, ia sering menitipkan kelebihan rezeki yang dititipkan Tuhan padanya kepada orang-orang marginal itu.

Makanya tak heran banyak sekali orang yang merasa dekat dengan Almarhum. Dan seperti namanya, Agam, beliau adalah orang yang secara fisik gagah. Tinggi, berkulit putih dan

tampam. Rajin ibadah, pengetahuannya mendalam mengenai banyak hal, namun rendah hati. Semua kebaikan seakan berhimpun padanya.

Mungkin satu-satunya kemalangan almarhum adalah sepanjang hidupnya beliau hidup sendiri. Tanpa istri dan anak. Ya, warga Pandan Wangi tak sekalipun pernah melihat Haji Agam bersama anak dan istrinya. Tentang bisnisnya yang menopang Haji Agam sehingga hidup berke-lingkaran pun tak banyak orang tahu. Bahkan mungkin tak ada yang tahu.

Ketika suatu waktu, saat rehat rapat di Balai Desa, beberapa warga pun bercengkrama dan bercakap-cakap, tak terkecuali Haji Agam yang ambil bagian dari kongkow-kongkow itu. Percapakan berputar soal desa mereka. Soal musim kering yang tak kunjung usai. Soal mimpi-mimpi siang bolong orang kampung, yang ingin hidup lebih maju dan sejahtera. Ketika obrolan itu sampai padanya.

"Pak Haji, dengar-dengar punya sawah luas ya di kampung?" tanya seseorang berpeci hitam

"Ahh gak seberapa Pak di Jawa." Jelas Haji Agam sambil tersenyum.

"Gak seberapa tapi kayaknya Pak Haji gak pernah susah." timpal yang lain diikuti tawa yang lain.

Yang diajak bercanda hanya tersenyum saja.

Tidak jelas di Jawa sebelah mana lokasi usaha Haji Agam. Yang masyarakat tahu, walaupun Haji Agam seorang pekerja kantor, mereka tak pernah melihat ia berangkat de-

ngan pakaian kantor untuk bekerja. Bahkan walaupun ia punya usaha di sekitar rumahnya, pun tak ada yang tahu usaha apa yang bisa membuat Haji Agam begitu sejahtera dan berkecukupan.

Tak kurang sebulan sekali ia mengundang seratusan anak yatim ke rumahnya untuk ia santuni. Tak terhitung janda miskin yang ia bantu kehidupannya. Tak terbilang anak-anak putus sekolah yang ia jamin sekolahnya. Tak ada yang tahu dari mana harta itu begitu melimpah ruah. Yang orang-orang tahu, Haji Agam adalah orang baik. Itu saja.

\*\*\*

Tibalah saat pemakaman. Ratusan orang tumpah mengiringi tandu jenazah yang dibawa menuju area pemakaman yang berjarak empat ratus meter dari rumah almarhum. Di sana ratusan orang sudah memadati area pemakaman. Hari itu seakan tak ada kegiatan rutin yang dilakukan warga Pandan Wangi. Pekerjaan dan usaha mereka tinggalkan sejenak, seakan ingin memberi penghormatan terakhir pada almarhum. Seorang yang kepergiannya seakan meninggalkan ruang kosong yang begitu dalam di hati masyarakat sekitar.

Sebelum mendiang dimasukkan ke liang lahat, tak lupa pihak keluarga menyampaikan beberapa hal sebagaimana yang biasa dilakukan dalam sebuah acara pemakaman. Permohonan maaf dan jika ada yang tersangkut hutang-piutang agar menghubungi keluarga. Nam-pak beberapa orang berdiri di sekitar pusara, dengan mengenakan pakaian hitam-hitam.

Seorang lelaki tua dengan kisanan usia 60 tahun, maju mewakili keluarga Haji Agam. Dengan baju koko hitam dan peci putih pembawaannya terlihat tenang, namun tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Suaranya bergetar.

"Bapak-Ibu yang kami hormati, hari ini kami mewakili keluarga besar, menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan dan kesediaan Bapak-Ibu menghantarkan almarhum, yang tak lain adalah Kakak dan Paman kami, ke peristirahatannya yang terakhir." Tangisnya pecah. Seorang perempuan berbadan gemuk di belakangnya memegang erat pundak lelaki berpeci putih itu.

"Mohonlah kiranya apabila semasa hidup almarhum ada sangkut-paut hutang-piutang atau janji yang belum ditunaikan, kiranya bisa menghubungi kami pihak keluarga dengan segera, agar Beliau mendapatkan kedamaian di alam sana." Ucap seorang lelaki tua berpeci putih itu.

Rasanya baru kali itulah orang-orang baru tahu wajah-wajah kerabat Haji Agam. Maklum, 30 tahun tinggal di wilayah

ini tak sekali pun ada hajatan besar yang diselenggarakan di rumahnya kecuali santunan kepada fakir miskin itu tadi. Itu pun hanya di bantu oleh Nani, pembantunya yang tak tinggal di rumahnya karena ia adalah buruh cuci yang tinggal di kampung sebelah, dan Sarpin, sekuriti RT 04, wilayah rumah Haji Agam tinggal.

\*\*\*

Langit mulai gelap. Mendung menggelayuti petala langit. Jenazah pun dikebumikan dengan tenang. Selepas doa bersama usai, para peziarah pun berangsur-angsur meninggalkan area pemakaman. Hanya beberapa gelintir saja yang terhitung kerabat dekat yang masih bertahan di sekitar pusara.

Aku dan beberapa teman yang kebetulan tadi mengusung jenazah dengan keranda, mulai mengangkut keranda dan alat-alat lainnya ke atas mobil bagasi terbuka yang kami bawa.

Tak begitu jauh dari pusara, sesosok perempuan dengan pakaian serba hitam dan kerudung yang menutupi sebagian rambutnya berdiri tenang, namun sepertinya mengambil jarak. Di sampingnya seorang anak lelaki yang ku kira berusia sekitar sepuluh tahun, berdiri menggigit tangan perempuan itu.

Sebetulnya perempuan ini sedari tadi berdiri di sana. Aku ingat betul ia datang ketika pidato pemakaman baru saja dimulai. Namun karena tidak ada yang mengenalnya, maka tak ada yang memulai menyapanya, apalagi bercakap-cakap.

Perlahan ia berjalan mendekati pusara. Lima orang kerabat Haji Agam yang masih di sana saling berpandangan. Tanpa dinyana ia membuka kaca mata hitamnya, lalu mengulurkan tangannya ke arah lelaki tua berpeci putih.

"Saya Ratna, istri Almarhum." Ucapnya tenang, "Ini anak kami, Fajar Purnama."

Suasana semakin hening. Semua yang ada di sana seakan tak bisa berkata-kata. Bahkan kakiku seakan tidak lagi menapak bumi. Terlempar jauh dari alam logika.

Seketika itu pula hujan mulai turun. Orang-orang yang tersisa berangsur meninggalkan area pemakaman. Yang terakhir kulihat sebelum benar-benar pergi adalah, perempuan yang mengaku istri Almarhum Haji Agam dan anaknya itu bersimpuh di pusara Haji Agam. Menangis dalam deraian hujan.

Hidup ini kadang dipenuhi oleh tanda tanya yang tanpa seorang pun bisa menjelaskannya.

“  
SEORANG LELAKI TUA DENGAN  
KISARAN USIA 60 TAHUN, MAJU  
MEWAKILI KELUARGA HAJI AGAM.  
DENGAN BAJU KOKO HITAM DAN  
PECI PUTIH PEMBWAANNYA  
TERLIHAT TENANG, NAMUN TAK BISA  
MENYEMBUNYIKAN KESEDIHAN  
YANG MENDALAM. SUARANYA  
BERGETAR

# Orientasi Kontestasi Politik Lokal

**P**ELAKSANAAN Pilkada serentak yang kembali di gelar tahun ini telah memasuki babak kampanye, dalam sesi ini para pasangan calon beradu visi dan misi, program serta menawarkan alternatif pola kepemimpinan yang berbeda kepada masyarakat. Pola kampanye pun mulai secara bertahap meninggalkan pawai di jalanan, dan lebih mengedepankan adu gagasan dan pengalaman membuat Pilkada semakin menarik, terlebih dilakukan serentak di beberapa daerah. Pilkada serentak memunculkan keriuhan politik, di Jawa Barat, misalnya, pada saat yang bersamaan masyarakat Jawa Barat tidak hanya akan memilih gubernur dan wakil gubernur tetapi juga akan memilih pasangan walikota dan wakil walikota atau pasangan bupati dan wakil bupati.

Di sisi lain, Pilkada serentak didasari alasan pemerintah menghemat anggaran negara secara signifikan. Dengan pelaksanaan yang berkesinambungan, kelak seluruh daerah di Indonesia dapat melaksanakan Pilkada dalam satu waktu. Secara politik Menteri Dalam Negeri juga meyakini, Pilkada serentak dapat memperkuat proses konsolidasi demokrasi. Akan tetapi hal lain yang sesungguhnya penting dalam esensi Pilkada serentak bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi konsolidasi demokrasi dan keriuhan pesta demokrasi.

Pilkada merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Demokrasi deliberatif menuntut adanya pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, melibatkan rakyat secara langsung dalam penentuan kebijakan politik. Di sisi lain Pilkada juga harus menyadarkan para elite pemimpin yang terpilih agar bekerja untuk rakyat, termasuk di antaranya ikut melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan



Ilustrasi oleh: Odyssey

kepala daerah terpilih haruslah berdampak secara signifikan bagi kemajuan masyarakat.

Pilkada serentak yang demokratis perlu memerhatikan beberapa aspek, di samping aspek mekanisme penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Aspek lainnya yaitu Pilkada harus menjadi sarana bagi partai politik untuk menampilkan kader terbaik hasil rekrutmen

politik, bukan mereka yang dipilih secara instan atau mereka yang dipilih hanya karena populer. Memajukan kader hasil rekrutmen politik merupakan cermin bagaimana partai membangun demokrasi. Alasannya ketika selesai rekrutmen dilakukan, maka partai harus menjalankan peran sebagai lembaga yang memberikan pendidikan politik. Dalam proses itu partai membangun karakter kader mereka dan menjadikan mereka sebagai sosok yang memiliki visi dan misi serta orientasi kepemimpinan.

## Menjaga keamanan

Mewujudkan Pilkada serentak demokratis juga harus memerhatikan aspek keamanan. Pilkada serentak dengan segala keruihannya berpotensi menimbulkan gesekan politik di masyarakat. Untuk menghindari gesekan, partai politik dan calon kepala daerah mempunyai tanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Partai pendukung maupun calon kepala daerah harus menekankan kepada timnya untuk tidak melakukan kampanye negatif, tidak memprovokasi dan terprovokasi. Di samping itu kesiapan untuk menerima kekalahan dan menyikapi kemenangan dengan bijak juga merupakan hal penting. Kesemuanya itu adalah bagian dari proses pendewasaan berpolitik dan berdemokrasi.

Pemerintah, aparat keamanan, dan para partai pendukung perlu berkaca kepada penyelenggaraan Pilkada serentak 2017. Ketegangan-ketegangan pada Pilkada 2017 yang kemudian berujung konflik horizontal, seperti di Papua, Aceh dan Jakarta. Untuk itulah diperlukan komitmen dari para elite politik, tokoh masyarakat, dan agama untuk membantu pemerintah dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan.

Meski atmosfer persaingan Pilkada serentak 2018 belum sepanas Pilkada serentak 2017, para elite dan tokoh perlu dari sekarang mengantisipasi adanya potensi gesekan antarmassa pendukung yang bisa membuat kegaduhan. Kondusivitas keamanan hanya dapat dijaga bila seluruh elemen masyarakat, termasuk pasangan calon dan timnya, berkomitmen untuk menolak hal-hal yang dapat membuat rusak proses demokrasi.

Meskipun ancaman gangguan keamanan dalam Pilkada serentak tahun ini masih masuk dalam kategori rendah, tetapi potensi gangguan keamanan akan selalu ada. Seperti kemunculan dan penyebaran berita-berita *hoax*, *black campaign* atau *negative campaign* yang sudah mulai terasa di beberapa daerah. Jika berita-berita tersebut direspons secara emosional oleh kelompok pasangan calon tertentu dalam bentuk serangan balik yang serupa, dikhawatirkan akan menimbulkan perang informasi yang tidak sehat, bahkan bisa menimbulkan konflik nyata di lapangan.

Perlu disadari perang informasi yang semula dianggap sederhana dan hanya berada pada tataran media, bila didiamkan bisa menimbulkan konflik fisik. Contohnya kita bisa melihat panasnya iklim politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, persaingan antarmassa pendukung yang tidak selesai pada ranah media sosial kemudian berlanjut di lapangan yang dalam beberapa kesempatan terjadi gesekan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di London sebagai Ibukota Inggris juga pernah merasakan meluasnya konflik dan kerusuhan sosial pada 2011 akibat menjalarnya arus informasi provokatif lewat media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Dengan kata lain diperlukan kesadaran untuk mendorong masyarakat agar menjadi warga yang cerdas dan bijak, mereka harus bisa didorong untuk menentukan mana informasi yang baik, layak di respon, dan disebar.

## Kontestasi politik

Kontestasi dalam Pilkada serentak harus diprioritaskan pada persaingan visi dan misi serta program pasangan calon kepa-

la daerah, tujuannya agar masyarakat mengetahui dan paham terhadap orientasi politik calon pemimpin mereka. Kontestasi politik dalam Pilkada apabila mengacu kepada pandangan Aristoteles yang menyatakan "*politics is a good life*", harus dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk memberikan tawaran kebaikan kepada masyarakat. Kekuasaan yang kelak dijalankan harus mampu memberikan kesejahteraan dan adanya perlindungan keamanan terhadap semua lapisan masyarakat, sehingga kontestasi politik yang sedang dijalankan bukan hanya sekadar untuk mendapatkan kekuasaan.

Tidak jadi persoalan, jika ada pasangan calon kepala daerah menggunakan cara tertentu untuk memenangkan kontestasi, selama cara itu tidak merugikan pihak lain. Sebagaimana misalnya pola pencitraan diterapkan untuk menjaring suara. Tetapi yang lebih penting adalah kemampuan calon pemimpin dalam membuat visi dan misi serta program yang baik bagi masyarakat, sebab itulah hakikat *politics is a good life*.

Karenanya, mereka yang akan dipilih haruslah benar-benar cakap keahlian dan kemampuannya. Kemampuan itu meliputi kemampuan menyusun strategi, visi dan misi serta program yang berorientasi bagi masyarakat. Dengan demikian jika terpilih kelak, kepala daerah sudah memunyai rancang bangun pemerintahan yang akan dijelankannya.

Di tengah kontestasi politik yang begitu ketat, Pilkada serentak 2018 tetap harus dijadikan alat mewujudkan kehidupan politik yang sehat, bersih dan demokratis. Hakikat meraih kekuasaan dalam kehidupan politik yang berkaitan dengan Pilkada secara langsung harus disesuaikan dengan makna kehidupan yang demokratis. Di mana antara masing-masing kandidat harus bersaing secara sehat. Pasangan calon kepala daerah dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada proses meraih kekuasaan, tetapi juga dituntut untuk menjalankan kekuasaan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat banyak.

Sebagaimana juga diutarakan oleh John Locke, kekuasaan atau kekuatan politik dalam kehidupan demokrasi haruslah didasarkan pada upaya untuk menciptakan kebaikan masyarakat (*political power only for the public good*). Apabila kebaikan masyarakat menjadi tujuan dari pasangan calon kepala daerah maka dengan sendirinya masyarakat dapat melihat mana calon yang selama proses Pilkada lebih mengedepankan moral dan etika publik, baik terhadap masyarakat maupun perilakunya terhadap kandidat lain.

Yusa Djuyandi

Dosen /Ketua Pusat Studi Keamanan Nasional dan Global Universitas Padjadjaran



# Green Sukuk dan Era Baru Pendanaan Lingkungan

**M**ENGINGAT posisinya dilintasi Khatulistiwa, Indonesia disinari matahari selama 365 hari secara sempurna. Akibatnya keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi salah satu yang paling kaya di dunia. Bangsa kita juga dikenal sebagai *ring of fire* karena banyaknya gunung berapi aktif yang secara tidak langsung membantu menyuburkan bumi Nusantara. Ketika isu pemanasan global sedang mengemuka, Indonesia kemudian memegang peranan terpenting dalam menangkal dampak-dampak tersebut melalui upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi hutan yang dianggap menjadi sumber utama meningkatnya laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Meningkatnya isu pemanasan global, sekiranya memiliki dampak positif bagi Indonesia jika dikaitkan dengan upaya menjaga kesinambungan berbagai kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah baik migas, mineral/non-mineral maupun logam lainnya. Terlebih di era saat ini, pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan APBN terhadap penerimaan berbasis SDA melalui pengembangan berbagai industri jasa, pariwisata serta perdagangan dan manufaktur.

Selain ratifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan global (SDG), komitmen pemerintah dalam mengatasi dampak pemanasan global diregulasikan secara nasional melalui penerbitan Perpres terkait Rencana Aksi Nasional Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di tahun 2011 serta RAN Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (API) pada 2014. Di dalam Perpres tersebut dinyatakan target penurunan emisi GRK nasional hingga 26% dengan pendanaan sendiri (APBN/APBD) serta 41% di 2020, jika dibantu pendanaan internasional.

Pada 2016, kerangka regulasi di dalam Perpres tersebut direvisi dalam mekanisme ratifikasi *Paris Agreement* yang menghasilkan dokumen *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia, dengan menambah target penurunan emisi menjadi 29% dan 41% di tahun 2030. Dan setiap tahun pemerintah kemudian menyampaikan secara resmi laporan kinerja realisasi penurunan emisi GRK kepada lembaga resmi PBB dalam kerangka UNFCCC.

Di bandingkan era pemerintahan sebelumnya, terdapat sedikit perbedaan di dalam strategi implementasinya. Jika di periode



sebelumnya visi mengatasi persoalan pemanasan global diatasi dengan pendekatan fungsi lingkungan hidup (LH) secara mandiri, maka di periode saat ini strategi yang dikembangkan juga diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan seperti yang tertuang di dalam Nawa Cita (9 agenda prioritas). Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata berdasarkan isu LH saja, melainkan diperkuat melalui pendekatan infrastruktur

ekonomi seperti misalnya, bagaimana upaya mengintegrasikan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan tema infrastruktur maupun beberapa isu-isu lainnya seperti tema gender, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan ini, pemerintah meyakini, pembangunan dapat berjalan lebih berkesinambungan.

Untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah juga berupaya memastikan adanya *governance* yang kuat. Sebagai catatan, saat ini penggundulan hutan dan perubahan penggunaan lahan merupakan kontributor utama atas tingkat emisi Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah mempersiapkan seperangkat alat pencegahan awal melalui kewajiban penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di daerah untuk memastikan bahwa eksternalitas yang dihasilkan dapat diatasi.

Di sisi lain, dengan tetap memprioritaskan upaya konservasi terhadap area hutan lindung, lahan gambut, area hutan bakau, dan beberapa area lain dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, pemerintah juga telah mengeluarkan larangan atas kegiatan pembukaan hutan primer serta larangan untuk mengonversi lahan gambut.

## Green sukuk

Sayangnya, masalah pendanaan masih selalu menjadi persoalan klasik. Banyak pihak baik di level pemerintah pusat maupun daerah selalu merasa, komitmen masih terganjal pada kebutuhan pendanaan yang masih kerap terjadi konflik maupun tidak tepat sasaran. Akibatnya beberapa pihak menganggap komitmen pemerintah masih terbatas di atas dokumen, belum sampai menyentuh aspek implementasi di lapangan. Meskipun sejauh ini semua langkah dan kebijakan juga sudah diselaraskan mulai dari upaya memasukkan isu keberlanjutan dan dukungan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan SDA di dalam Rencana

Kerja Pemerintah (RKP), penguatan alokasi belanja pemerintah hingga penyalangan alokasi belanja transfer ke daerah.

Berbagai skema pendanaan inovatif juga dilirik melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Di dalam regulasi tersebut diatur segala hal yang terkait skema *green banking*, *green sukuk*, *green bond*, *green tax*, *green insurance*, *ecological fiscal transfer* (EFT), *payment ecosystem services* (PES) dan juga dana wali amanat lingkungan hidup. Dana *on call* pemerintah sebagai jaminan pemulihan lingkungan hidup juga dijelaskan secara mendetail di dalam PP tersebut.

Dari aspek akuntabilitas dan transparansi alokasi anggaran terkait lingkungan hidup, sejak tahun 2015 pemerintah sudah menerapkan mekanisme penelusuran anggaran (*budget tagging*) di level nasional. Dengan *budget tagging* tersebut, realisasi belanja pemerintah terkait lingkungan hidup dapat ditelusuri apakah memiliki keterkaitan langsung atau cuma bersifat pendukung di dalam upaya menurunkan emisi GRK. Pemerintah juga dipaksa untuk mulai memikirkan bagaimana menyusun perencanaan penganggaran dengan lebih *simple* dan cerdas di dalam menyelaraskan input, program, kegiatan, *output* dan *outcome*. Dengan demikian ke depannya pola perencanaan penganggaran di sektor lingkungan hidup pemerintah betul-betul mencerminkan aspek *performance based budgeting*.

Sejak 2015, *budget tagging* mulai diwajibkan untuk aspek mitigasi perubahan iklim di 6 Kementerian/Lembaga (K/L) yang ditunjuk yaitu KLHK, Kementan, Kemen ESDM, Kemenperin, Kemen PUPERA dan Kemenhub. Di tahun 2018 ini, kewajiban *budget tagging* kemudian diperluas ke dalam aspek adaptasi perubahan iklim yang menyangkut kewenangan 17 K/L lainnya. Ke depannya, kewajiban tersebut akan terus diperluas untuk tematik anggaran lainnya yang memiliki *sharing* kewenangan lebih luas misalnya tematik gender, infrastruktur, kemiskinan dan kerja sama selatan-selatan.

Setelah reformasi penganggaran melalui mekanisme *budget tagging* berhasil dijalankan, pemerintah merasa memiliki *level of confidence* yang relatif tinggi untuk kemudian secara resmi menerbitkan *the 1st Green Sukuk* sebesar US\$1,25 miliar dengan nama Sukuk Wakalah bertenor 5 tahun dengan yield sebesar 3,75%. *Underlying asset* yang digunakan sebesar 51% adalah barang milik negara (BMN) berupa tanah dan bangunan sementara 49%-nya adalah proyek-proyek di K/L yang saat ini sedang dibiayai.

Dana hasil penjualan Green Sukuk ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori *green*. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun pemerintah, beberapa proyek yang dikategorikan *green* diantaranya: efisiensi energi dan *renewable energy*, *green building*, *green tourism*, *disaster risk reduction*, *sustainable transport*, *waste to*

*energy* dan *waste management*, *sustainable management natural resources* serta *sustainable agriculture*.

Panduan umum Green Sukuk pemerintah itu sendiri sudah melewati tahapan *review* secara mendalam oleh CICERO (Center for International Climate Research) salah satu lembaga pemeringkat terkemuka dunia berbasis di Norwegia. Di 2016, CICERO mendapatkan pengakuan dari Climate Bonds Initiative serta di tahun 2017 mendapatkan anugerah *the best external reviewer in the Worlds* untuk bidang penerbitan *Green Bonds* dan Sukuk negara, dari lembaga Environmental Finance.

Oleh CICERO, dokumen panduan Green Bonds dan Sukuk Indonesia diberikan penilaian Medium Green dengan rekomendasi yang sangat *strong*. Hal ini sangat terkait dengan kelengkapan dokumen yang dapat disampaikan sebagai indikator awal kesiapan pemerintah dalam mendukung penerbitan Green Sukuk ini. Di level global, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk ini setelah sebelumnya beberapa negara lain seperti Perancis, Fiji dan Polandia sudah terlebih dahulu menerbitkan Green Bonds.

Selain menunjukkan komitmen pemerintah, Green Sukuk ini juga merupakan instrumen yang memberikan sinyal atas dukungan Indonesia terhadap perluasan pasar Green Bond dan Green Sukuk baik domestik maupun internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara. Karenanya Indonesia patut bangga terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan menuju masa transisi pembangunan rendah karbon. Dalam kurun waktu secepatnya, pemerintah juga kembali berencana untuk menerbitkan *Green Bond* sebagai tindak lanjut penerbitan *Green Sukuk*.

Jika *Green Sukuk* diterbitkan atas *underlying asset based project*, maka penerbitan *Green Bond* dapat ditetapkan atas penerbitan program-program bersifat *green* milik pemerintah yang memerlukan tambahan pembiayaan. Perbedaan lainnya yang fundamental jika *Green Sukuk* diterbitkan berdasarkan mekanisme sistem syariah maka *Green Bond* dapat diterbitkan dengan berlandaskan sistem pasar modal konvensional. Namun demikian, kedua program ini masih didasarkan atas penjaminan program pemerintah yang sudah ditelusuri anggarannya melalui mekanisme *budget tagging*. Dengan demikian terlihat jelas bahwa mekanisme *budget tagging* betul-betul menjadi tonggak reformasi pengelolaan anggaran pemerintah dan menciptakan berbagai peluang terbitnya kebijakan susulan sebagai bentuk *affirmative policy*.

Di masa mendatang, Indonesia beraspirasi untuk dapat menjadi *repeated issuer* atas Green Bond dan Green Sukuk lainnya apabila kondisi pasar memungkinkan. Dan bagi seluruh komponen masyarakat sekiranya dapat terus membantu pemerintah khususnya terkait mekanisme pelaporan dan evaluasi penggunaan demi menciptakan asas transparansi dan akuntabilitas publik yang terjaga baik.

Joko Tri Haryanto

Bekerja di Badan Kebijakan Fiskal (BKF)  
Kementerian Keuangan RI



# Batam

**B**ATAM yang dulu dibangun dan didesain guna menjadi kawasan industri berteknologi tinggi terpadu dan berdaya saing, kini sudah tidak berjaya seperti dulu lagi. Padahal, posisi strategis Batam yang *enclave* dan berbatasan dengan Singapura sangat efektif dikembangkan menjadi lokomotif perekonomian nasional. Namun, itu tinggal kenangan.



dakkondusifan ini menyebabkan anjloknya ekonomi Batam. Pertumbuhan Batam bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perannya sebagai lokomotif ekonomi nasional melenyap.

Adanya sejumlah Undang-Undang (UU) memperparah keadaan ini. BP Batam memiliki dasar melalui UU No 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pengembangan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas semakin jauh tertinggal dibandingkan negara jiran, Malaysia. Kini, Batam semakin meredup.

Meredupnya Batam tidak lain akibat adanya dualisme pengelolaan yang berkepanjangan dan sampai hari ini belum kunjung usai. Keinginan pemerintah pusat untuk menjadikan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari yang semula berstatus kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) pun *mandeg* akibat dualisme itu. Akhirnya, Batam mengalami disorientasi arah pembangunan.

Pangkal persoalan itu senyatanya bermula dari pemekaran Provinsi Riau yang melahirkan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang didukung Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (OB). Kepala OB dan Wali Kota Batam berkeinginan menjadi Gubernur Kepri. Kompetisi keduanya menyebabkan upaya saling menjatuhkan. Pengelolaan Batam pun menjadi rebutan. Perselisihan sedikit mereda ketika mantan Kepala OB menjadi Gubernur Kepri dan terjadi perubahan struktur organisasi. OB berubah menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam, berada di bawah Dewan Kawasan (DK) Batam yang diketuai Gubernur Kepri.

Sebagai Ketua DK, Gubernur Kepri memiliki kapasitas mengendalikan BP dan Pemerintah Kota Batam dalam mengelola Batam. Karena mantan Kepala OB, tentu Gubernur piawai, sehingga Batam relatif tenang, promosi ke luar negeri gencar, dan investor berdatangan. Celaknya, mantan Kepala OB hanya menjabat Gubernur Kepri selama satu periode. Struktur organisasi tidak berubah, Gubernur Kepri tetap sebagai Ketua Dewan Kawasan.

Namun, gubernur baru tidak punya pengalaman mengelola lembaga khusus seperti BP Batam. Perselisihan kembali mencuat. Tampaknya, memang banyak pihak yang ingin *cawecawe* mengatur Batam. Batam pun bagaikan sebuah kapal dengan banyak nahkoda. Hal ini jelas tidak kondusif. Ketidakkondusifan ini menyebabkan anjloknya ekonomi Batam.

Pelabuhan Bebas Batam. Sedangkan Pemerintah Kota Batam berpegang teguh pada UU No 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. Secara *de jure*, BP Batam memiliki kewenangan yang lebih kuat. Sebab, tidak ada satu pun aturan perundangan yang membatalkan kewenangan BP Batam. Bahkan, khusus untuk perizinan usaha, dibentuk lembaga pelayanan terpadu di bawah BP Batam sesuai Perpres No 97 Tahun 2014. Aturan tersebut dengan tegas menyatakan penyelenggaraan pengurusan perizinan dan non perizinan mulai dari yang menjadi urusan pemerintah, pemprov, pemkot di kawasan FTZ, diselenggarakan oleh BP Batam.

UU No 44 Tahun 2007, sejalan dengan Keppres No 41 Tahun 1973 yang menugaskan BP Batam untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai daerah industri, kegiatan *trans-shipment* (pengalih-kapalan), merencanakan dan mengusahakan kebutuhan prasarana dan fasilitas Batam, serta mengelola perizinan investasi. Aturan yang sama juga memberi wewenang kepada BP Batam yang meliputi tiga aspek, yakni pertanahan (termasuk hak pengelolaan, peruntukan, penggunaan atas tanah dan menerima uang wajib tahunan atas tanah), pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, dan pelayanan investasi. Namun, dalam praktiknya, tugas dan kewenangan tersebut tidak berjalan dengan mulus akibat munculnya 'dua nahkoda' dalam pengelolaan kawasan tersebut, yakni BP Batam dan Pemkot Batam.

Oleh karenanya, pemerintah pusat harus segera mengakhiri dualisme ini. Pengelolaan Batam kembalikan ke sejarah awal pembentukannya. Pemerintah pusat pun perlu turun tangan mengelolanya. BP Batam dikelola saja oleh pemerintah pusat, langsung di bawah kendali Presiden. Kendati begitu, penguasaan penuh pemerintah pusat harus juga melibatkan pemerintah daerah dan DPRD Kepri dan DPRD Batam. Komunikasi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan di Batam tetap diperlukan agar keharmonisan pemerintahan tetap terjaga.

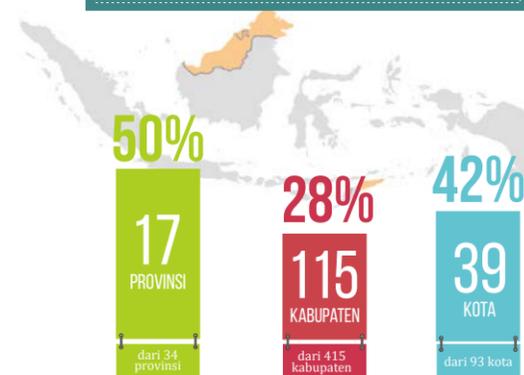
● Moh Ilham A Hamudy

## 27 JUNI 2018 PILKADA SERENTAK 2018

*Pilkada sehat, pilkada tanpa sara dan hoax; Pilkada jurdil, tanpa politik uang dan netral; Pilkada gembira, kita semua bersaudara*



### PENYELENGGARAAN PILKADA



### PARTISIPASI PEMILIH



### TEROBOSAN IT PILKADA

**VIDEO CONFERENCE**  
34 PROVINSI

**MESIOTDA**  
VIDEO MEETING  
CHATING  
UNLIMITED GROUP  
UNLIMITED MEMBER CHAT

### ANGGARAN PILKADA

RP

# 20 T

PROYEKSI TOTAL ANGGARAN  
ANGGARAN KPU, BAWASLU, & PENGAMANAN

**PASAL 166 AYAT 1 UU NO 10 TAHUN 2016**

Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### PEMILIH PILKADA

DP4 PILKADA 2018

# 160.756.143

PEMILIH

# ±85%

PROYKSI DPT PILPRES 2019

DPT PILPRES 2014

# 190.307.134

PEMILIH

### NETRALITAS ASN (DASAR HUKUM)

- UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- SE KASN No B-2900/KASN/11/2017 Tanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pilkada Serentak 2018
- Surat MENPAN-RB No B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN
- **DALAM PROSES PEMBAHASAN INTENSIF** R-Permendagri tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

# CALL FOR Papers

## JURNAL BINA PRAJA

### THEME

## HOME AFFAIRS GOVERNANCE

### SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy  
Politics and Public Administration  
Territorial Administration  
and Rural Governance  
Population and Civil Registration  
Regional Election and Regional Innovation  
Regional Fiscal Policy and Development  
Other Issues in Public Administration

### TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) |

For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

### FOR MORE INFORMATIONS CONTACT US

Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri  
Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat  
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)  
[editorial@binaprajajournal.com](mailto:editorial@binaprajajournal.com)

### INDEXED BY:



### SUBMIT

a scientific paper  
on the theme of  
Home Affairs Governance  
to [jurnal.kemendagri.go.id](http://jurnal.kemendagri.go.id)

Accredited No 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016